

**UPAYA AUSTRALIA PALESTINE ADVOCACY NETWORK (APAN)  
DALAM MENDORONG KOMITMEN PEMERINTAH AUSTRALIA  
TERHADAP KONFLIK ISRAEL PALESTINA 2019-2024**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**AFIOA SYAZANA**

21323181

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2024/2025**

**UPAYA AUSTRALIA PALESTINE ADVOCACY NETWORK (APAN)  
DALAM MENDORONG KOMITMEN PEMERINTAH AUSTRALIA  
TERHADAP KONFLIK ISRAEL-PALESTINA 2019-2024**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**AFIQA SYAZANA**

21323181

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024/2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

### **Upaya Australia Palestine Advocacy Network (APAN) dalam Mendorong Komitmen Pemerintah Australia terhadap Konflik Israel-Palestina 2019- 2024**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

**24 Februari 2025**

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hadza Min Fadhli Robby
- 2 Mohamad Rezky Utama
- 3 Irawan Jati

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

24 Februari 2025 ,



---

Afiqa Syazana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4. Cakupan penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>1.6. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>10</b>
<b>1.7. Argumen Sementara .....</b>	<b>15</b>
<b>1.8. Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>1.8.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>18</b>
<b>1.8.4 Proses Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>1.9. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB 2 POSISI PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM ISU ISRAEL- PALESTINA .....</b>	<b>20</b>
<b>2.1. Perkembangan konflik Israel-Palestina &amp; respon Australia .....</b>	<b>20</b>
<b>2.2. Posisi Australia terhadap konflik Israel-Palestina .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB 3 APAN DAN PERANNYA DALAM MENGADVOKASI ISU ISRAEL- PALESTINA .....</b>	<b>39</b>
<b>3.1. Profil APAN.....</b>	<b>39</b>

3.2.	Aktivitas gerakan APAN dalam mengadvokasi isu Israel-Palestina ...	43
3.2.1	Lobby.....	46
3.2.2	Election.....	51
3.2.3	Propaganda.....	54
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
4.1.	Kesimpulan .....	59
4.2.	Rekomendasi.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>64</b>

## ABSTRAK

Konflik Israel-Palestina terus berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat, terutama sejak 7 Oktober 2023 Israel melancarkan serangan militer besar-besaran. Isu tersebut yang sebelumnya tidak terlalu sensitif dalam politik Australia, kini menjadi isu yang memecah. Kondisi ini mengundang simpati masyarakat global, termasuk individu, entitas politik, dan media. Salah satunya adalah Australia Palestine Advocacy Network (APAN), sebuah koalisi nasional yang memanfaatkan semangat warga Australia untuk hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan bagi Palestina. APAN bergerak sebagai *pressure group* yang berupaya mendorong perubahan positif dalam kebijakan Pemerintah Australia terkait konflik Israel-Palestina, Fokus penelitian ini terbatas pada periode antara tahun 2019 hingga 2024, di mana terjadi perbedaan kebijakan politik yang besar akibat pergantian kekuasaan dari Partai Liberal ke Partai Buruh, hingga berbagai perubahan signifikan dalam politik luar negeri Australia serta serangkaian peristiwa penting yang mempengaruhi dinamika konflik tersebut. Melalui lanskap kelompok tekanan penulis melihat bagaimana pengaruh yang dilakukan oleh APAN melalui tiga strategi yaitu lobi, propaganda, kampanye kesadaran dalam pemilu. Adapun hasil penelitian menunjukkan pengaruh gerakan APAN di Australia dengan menggunakan ketiga strategi tersebut berlangsung efektif. Meskipun APAN telah mencapai beberapa kemajuan, masih terdapat tantangan yang dihadapi. Kelompok pro-Israel yang kuat di Australia sering berusaha mendiskreditkan upaya APAN dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun, dukungan yang meningkat dari masyarakat serta beberapa politisi yang mendukung hak-hak Palestina memberikan harapan bagi APAN untuk terus mempengaruhi kebijakan pemerintah di masa depan.

**Kata Kunci :** *APAN (Australia Palestine Advocacy Network), Israel-Palestina, konflik kebijakan, pemerintah Australia, pressure group, Liberal, Buruh.*

## ABSTRACT

The Israel-Palestine conflict continues with increasing intensity, especially since October 7, 2023, when Israel launched a large-scale military assault. This issue, which was previously not very sensitive in Australian politics, has now become a divisive topic. This situation has garnered sympathy from the global community, including individuals, political entities, and the media. One key organization is the Australia Palestine Advocacy Network (APAN), a national coalition that channels the spirit of Australians for human rights, justice, and equality for Palestine. APAN operates as a pressure group that seeks to promote positive changes in the Australian government's policies regarding the Israel-Palestine conflict. This research focuses on the period from 2019 to 2024, during which significant political decisions occurred due to the shift in power from the Liberal Party to the Labor Party, alongside various significant changes in Australia's foreign policy and a series of important events that influenced the dynamics of the conflict. Through the landscape of pressure groups, the author examines the influence exerted by APAN using three strategies: lobbying, propaganda, and awareness campaigns during elections. The findings indicate that the APAN movement in Australia has effectively utilized these three strategies. Although APAN has made some progress, it still faces challenges. Strong pro-Israel groups in Australia often attempt to discredit APAN's efforts and influence government policy. However, the increasing support from the public and several politicians advocating for Palestinian rights provides hope for APAN to continue impacting government policies in the future.

**Keywords:** *APAN (Australia Palestine Advocacy Network), Israel-Palestina, conflict, policy, Australia government, pressure group, Liberal, Labor*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keberlanjutan konflik Israel dan Palestina tak kunjung reda hingga saat ini, Israel terus melancarkan serangan militer khususnya di Jalur Gaza. Saat ini tindakan Israel tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan genosida, yang mana bukan hanya serangan atau tindakan kekerasan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebuah proses sistematis dan terorganisir yang berlangsung dari waktu ke waktu yang dengan maksud memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok etnis, ras, bangsa, atau agama (Rosenberg 2012). Sejak 7 Oktober 2023, kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk, dengan kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan. Bantuan kemanusiaan yang masuk terbatas dan mengalami kesulitan dalam distribusi serta keamanan. Kehidupan warga sipil di Gaza dan Tepi Barat sangat menyedihkan, dan situasi darurat ini diperburuk oleh serangan terus-menerus dari *Israel Defense Forces* (IDF). *Camp* pengungsian yang ada sangat terbatas, dengan kondisi sanitasi yang memprihatinkan, berpotensi menyebabkan epidemi (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 2024). Krisis kemanusiaan ini telah menarik perhatian global, termasuk dukungan dari *Australia Palestine Advocacy Network* (APAN), yang berjuang untuk hak asasi manusia dan keadilan bagi Palestina.

Konflik antara Israel dan Palestina telah mendorong berbagai negara untuk mengambil sikap, termasuk Australia yang dianggap mulai mengubah pendekatannya. Australia memiliki sejarah hubungan baik dengan Israel, sebagai salah satu negara pertama yang mengakui berdirinya Negara Israel pada tahun 1948 (Ministry of Foreign

Affairs 2024). Meskipun Australia belum mengakui Palestina sebagai negara, pemerintahnya berkomitmen untuk mendukung solusi dua negara dalam konflik ini. Terdapat perubahan sikap dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Australia dalam menanggapi konflik Israel-Palestina, pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Partai Liberal, terlihat membuat kebijakan yang konservatif dan condong kepada Israel. Kemudian, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese, sikap Australia mulai bergeser menjadi lebih moderat, fokus pada pendekatan *two state solution* (Australia Palestine Advocacy Network 2024).

Dalam tahun pertama kepemimpinannya, Albanese membatalkan pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, menegaskan kembali upaya internasional untuk mencapai *two state solution* yang adil dan berkelanjutan, dimana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dengan damai dalam batas yang diakui secara internasional. Australia akan tetap menjadi teman setia Israel, tetapi juga mendukung rakyat Palestina dengan memberikan bantuan kemanusiaan sejak 1951 dan mendorong perundingan perdamaian. Pemerintahan Albanese menyesalkan keputusan Morrison yang menyebabkan perubahan posisi Australia dan penderitaan bagi banyak orang di komunitas yang peduli akan masalah ini (Australian Minister for Foreign Affairs 2022).

Periode kepemimpinan Albanese menjadi sangat penting untuk menentukan arah posisi Australia dalam konflik ini. Meskipun penggunaan istilah "wilayah yang diduduki" dan perubahan pengakuan ibu kota Israel sejalan dengan kebijakan negara-negara Barat seperti Inggris, Selandia Baru, dan Uni Eropa, pengakuan resmi terhadap Palestina akan membedakan kebijakan Australia dari sekutu dekat seperti Amerika

Serikat, Inggris, dan Kanada. Selain itu, langkah ini juga akan menunjukkan perbedaan kebijakan pemerintahan Albanese dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, serta mencerminkan keselarasan Australia dengan negara-negara yang telah mengakui Palestina, seperti Indonesia, Meksiko, Malaysia, Afrika Selatan, Thailand, Turki, dan Vietnam (Napach 2023).

Kehadiran APAN, sebagai gabungan organisasi dan individu di Australia yang bekerja sama untuk mempengaruhi kebijakan publik Australia terkait Palestina dan Israel, sejalan dengan resolusi PBB, hak asasi manusia, dan hukum internasional (*Australian Services Union (Victorian Private Sector Branch) 2023*). APAN berkomitmen untuk menggalang dukungan terhadap hak-hak Palestina melalui kegiatan advokasi dan diplomasi publik, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan solidaritas di Australia terhadap masyarakat Palestina dengan mempromosikan kampanye dan agenda pro-Palestina.

APAN terus berperan mempengaruhi opini publik dan kebijakan Australia Labor Party (ALP) terkait isu Palestina. Ketika Partai Buruh berkuasa, mereka harus menyelaraskan berbagai klaim dan tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan yang ada di masyarakat dengan kebijakan yang mereka buat, termasuk dalam hal kebijakan luar negeri dan hak asasi manusia (Moon and Sharman 2003). Sebagai sebuah jaringan advokasi yang fokus pada isu Palestina, APAN telah menggunakan berbagai strategi untuk mempengaruhi pandangan politikus dan partai politik di Australia. APAN secara aktif melakukan lobi kepada anggota parlemen untuk mendukung kebijakan yang lebih pro-Palestina.

Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti tekanan dari kelompok pro-Israel dan dinamika politik domestik, pengaruh APAN dalam membentuk pandangan politikus Australia mengenai isu Palestina tetap signifikan. APAN mengangkat berbagai isu penting terkait konflik Israel-Palestina, antara lain krisis kemanusiaan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari warga Palestina, termasuk kekurangan pangan, keterbatasan akses kesehatan, dan kondisi pengungsi yang memprihatinkan. APAN juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik, seperti serangan terhadap warga sipil dan penghancuran infrastruktur. Selain itu, mereka mendorong pengakuan terhadap negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara yang adil untuk konflik berkepanjangan ini. APAN mengkritik hubungan militer antara Australia dan Israel, menyerukan penghentian pasokan senjata yang berkontribusi pada ketegangan dan penderitaan di wilayah tersebut. APAN termasuk dalam kategori *Non-Governmental Organizations* (NGO) yang berfokus mengadvokasi keadilan bagi rakyat Palestina dengan meningkatkan kesadaran publik Australia maupun Internasional terhadap isu yang ada, seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial (Soken, n.d.).

Salah satu strategi APAN dengan memperkuat kemampuan advokasi generasi muda Palestina di Australia untuk beraksi dalam mendukung isu Palestina, memperluas jangkauan media mereka untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas media dalam melaporkan perspektif Palestina, serta meningkatkan keterlibatan di media sosial untuk mencapai audiens baru. Kemudian turut menyuarakan *campaign BDS (Boycott, Divestment and Sanctions)* terhadap Israel, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak asing seperti kelompok advokasi, media, pemerintah, dan organisasi internasional.

Mereka aktif berpartisipasi dalam konferensi global untuk memperkuat jaringan dengan aktor internasional yang sejalan dalam mendukung hak-hak Palestina dan mengkritik kebijakan Israel (Australia Palestine Advocacy Network, n.d.).

Ratusan ribu warga Australia turun ke jalan untuk mendesak pemerintah mengutuk genosida yang dilakukan Israel dan mengambil langkah untuk memastikan bahwa Israel mematuhi hukum internasional. Salah satu unjuk rasa besar diadakan pada 6 Oktober 2024, di mana ribuan demonstran pro-Palestina memprotes serangan Israel yang telah berlangsung selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. Demonstrasi ini berlangsung di kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Adelaide (Anadolu 2024). Nasser Mashni, Presiden APAN, menyatakan bahwa protes tersebut jelas menunjukkan dukungan publik kepada pemerintah Australia untuk mengatasi kejahatan genosida di Gaza dengan menerapkan tindakan tegas guna menekan Israel agar mengakhiri kekejamannya terhadap warga Palestina (Australia Palestine Advocacy Network 2024).

APAN menyerukan kepada Pemerintah Australia untuk mengatasi genosida di Gaza melalui pengaruh diplomatik dan kolaborasi proaktif bersama negara-negara kekuatan menengah lainnya dengan menuntut gencatan senjata yang segera, permanen, dan tanpa syarat serta memungkinkan akses tanpa batas pada bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina (Australia Palestine Advocacy Network 2024). Tetapi, belum ada keputusan pemerintah Australia yang signifikan terkait kejahatan genosida yang dilakukan Israel di Palestina. Karena itu, penulis akan meneliti upaya dari APAN dalam mendorong komitmen pemerintah Australia terhadap konflik Israel-Palestina.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya APAN dalam Mendorong Komitmen Pemerintah Australia terhadap Konflik Palestina-Israel 2019-2024?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan upaya APAN dalam Mendorong Komitmen Pemerintah Australia terhadap konflik Israel-Palestina.
2. Mengetahui upaya APAN sebagai kelompok tekanan dalam mempengaruhi kebijakan politik dan kesadaran publik Australia.

## **1.4. Cakupan penelitian**

Penelitian ini akan mengulas peran dan usaha APAN sebagai *pressure group* yang berupaya mendorong perubahan positif dalam kebijakan Pemerintah Australia terkait konflik Israel-Palestina. Fokus penelitian ini terbatas pada periode antara tahun 2019 hingga 2024, di mana terjadi perbedaan keputusan politik yang besar akibat pergantian kekuasaan dari Partai Liberal ke Partai Buruh, berbagai perubahan signifikan dalam politik luar negeri Australia serta serangkaian peristiwa penting yang mempengaruhi dinamika konflik tersebut. Selain itu, laporan mengenai perkembangan krisis kemanusiaan akibat agresi militer Israel di Palestina akan menjadi bagian integral dari analisis ini. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi keberhasilan yang dicapai serta tantangan yang dihadapi APAN dalam usahanya untuk mendorong komitmen Pemerintah Australia terhadap isu-isu yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

Kejahatan genosida Israel atas Palestina tentunya menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah dan berkepanjangan, di tengah kehancuran massal serta kelangkaan kebutuhan pokok, Israel tanpa henti melancarkan serangan militer mematikan di berbagai wilayah di Palestina. Hingga saat ini permasalahan tersebut belum menemukan titik temu, aktor negara dalam hal ini dianggap tidak optimal dalam memainkan perannya sebagai aktor utama karena dilatarbelakangi berbagai kepentingan. Sehingga, dalam tinjauan pustaka ini, penulis mengumpulkan beberapa artikel dan penelitian yang membahas tentang isu tersebut, termasuk bagaimana aktor non-negara sebagai kelompok tekanan dan interaksi lintas negara untuk mempengaruhi kesadaran publik dan kebijakan politik terkait krisis kemanusiaan di Palestina. Kemudian pembahasan mengenai pandangan ALP terhadap konflik Israel-Palestina hingga munculnya kelompok penekan dalam dunia hubungan internasional menantang hegemoni aktor negara.

Salah satunya penelitian oleh Andrew Lim yang mengeksplorasi aktivitas dan strategi kelompok advokasi pro-Palestina dan pro-Israel di Selandia Baru dan Australia dalam konteks jaringan lintas negara, diplomasi publik, dan branding negara. Adapun kelompok advokasi yang diteliti dalam artikel ini adalah *Australia Palestine Advocacy Network (APAN)*, *Palestine Solidarity Network Aotearoa (PSNA)*, *Israel Institute of New Zealand (IINZ)*, serta *Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC)*. Tulisan ini membahas bagaimana kelompok-kelompok advokasi tersebut dapat beroperasi sebagai *pressure group* yang memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan publik melalui strategi yang efektif, kelompok-kelompok ini dapat

mempengaruhi keputusan pemerintah dan membentuk opini publik di negara-negara yang terlibat. Kemudian juga tulisan ini membahas peran diplomasi publik dalam membentuk persepsi, membangun hubungan, mempengaruhi opini publik, dan mendapatkan dukungan untuk tujuan mereka dalam memajukan kepentingan kelompok pro-Palestina dan pro-Israel di Australia dan New Zealand. Penulis menganalisis strategi yang digunakan oleh kelompok advokasi tersebut untuk meningkatkan visibilitas, kredibilitas, dan dampak mereka dalam mempengaruhi persepsi mengenai konflik Israel-Palestina di wilayah tersebut (Lim 2022).

Artikel yang ditulis oleh Miriam Sadler pada Mei 2018 mengevaluasi berbagai pandangan di dalam Partai Buruh Australia mengenai pengakuan Palestina. Artikel ini membahas debat internal dan perbedaan pendapat yang signifikan antara anggota partai ALP mengenai isu Israel-Palestina, yang mencerminkan kompleksitas isu tersebut dalam konteks politik Australia. Tulisan ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan anggota ALP terhadap isu-isu hubungan internasional, politik domestik, dan ideologi partai. Selain itu, Sadler menjelajahi prospek dan tantangan yang terkait dengan resolusi yang mengadvokasi pengakuan segera negara Palestina yang diadopsi dalam konferensi nasional ALP pada Juli 2018. Dalam jurnal ini dinyatakan bahwa kelompok lobi/tekanan di Australia memiliki pengaruh besar terhadap ALP, terutama menjelang konferensi nasional. Kelompok pro-Israel, yang di pimpin oleh AIJAC, memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi kebijakan Australia tentang Timur Tengah dan sering mendanai perjalanan ke Israel untuk anggota parlemen. Sementara itu, lobi pro-Palestina melalui APAN, kurang terkoordinasi dan memiliki sumber daya terbatas. Untuk mendukung pengakuan

Palestina, lobi Palestina perlu menyusun kebijakan yang lebih solid dan kohesif untuk mempengaruhi anggota ALP, terutama menghadapi pengaruh kuat dari lobi pro-Israel dalam *Labor Right*. Secara keseluruhan, artikel Sadler memberikan evaluasi komprehensif tentang dinamika internal ALP mengenai pengakuan Palestina, menunjukkan bagaimana tekanan dari anggota partai dan masyarakat dapat membentuk agenda politik dan keputusan yang diambil oleh partai, serta memberikan wawasan tentang kompleksitas isu ini dalam lanskap politik Australia (Sadler 2018).

Dalam tulisan Sari Hanafi dan Linda Tabar, pada salah satu babnya membahas mengenai *transnational networking in multi-level view*. Tinjauan pembahasan ini mengeksplorasi pandangan multi-level terhadap jaringan dalam elit global Palestina, dengan fokus pada interaksi dan hubungan antara para donor, organisasi internasional, dan LSM lokal. Bab ini menjelaskan bagaimana aktor-aktor lintas negara berkolaborasi dan berinteraksi untuk mempengaruhi dan membentuk masyarakat Palestina dalam skala global. LSM lokal berinteraksi dengan donor internasional dan organisasi non-pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan Palestina melalui dukungan finansial dan teknis. Namun, interaksi ini dapat menciptakan ketergantungan, di mana LSM lokal tertekan untuk mengikuti agenda donor, yang mengurangi otonomi mereka. Jaringan lintas negara yang melibatkan berbagai aktor beroperasi di berbagai level, termasuk kolaborasi strategis dan pertukaran sumber daya antara elit global Palestina, donor, organisasi internasional, dan LSM lokal. Elit global, yang memiliki koneksi dan pengaruh lintas negara, memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat Palestina. Para donor, organisasi internasional, dan LSM lokal bekerja sama dalam mengatasi isu-isu, melaksanakan proyek, dan mengadvokasi hak-hak Palestina,

memperlihatkan kerjasama yang erat di antara berbagai entitas. Secara keseluruhan, bab *transnational networking: multi-level view* memberikan wawasan tentang dinamika kompleks dari jaringan lintas negara dalam elit global Palestina, mengungkapkan bagaimana organisasi internasional, dan LSM lokal berinteraksi dan bekerja sama untuk mempengaruhi masyarakat Palestina dalam skala global (Hanafi and Tabar 2005).

Berdasarkan temuan sebelumnya mengenai penelitian tentang upaya berbagai aktor dalam mengadvokasi hak-hak Palestina, belum ada yang secara spesifik membahas peran APAN dalam konteks *pressure group*. Penelitian pertama tidak secara eksplisit menyebut APAN, melainkan membandingkan beberapa LSM pro-Palestina dan pro-Israel di Australia dan New Zealand, sementara Artikel kedua hanya memberikan evaluasi komprehensif tentang dinamika internal ALP terkait pengakuan negara Palestina. Tulisan ketiga tidak mencakup APAN sebagai aktor, dan hanya memberikan informasi tentang interaksi organisasi internasional dan LSM lokal. Dengan demikian, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan fokus pada analisis upaya APAN dalam mendorong komitmen pemerintah Australia terhadap konflik Israel-Palestina dari tahun 2019 hingga 2024, sehingga memberikan wawasan baru mengenai pengaruh *pressure group* dalam kebijakan luar negeri Australia.

## **1.6. Kerangka Pemikiran**

Landasan teori digunakan oleh penulis menjadi pondasi penting dalam penelitian ini, membantu penulis untuk merumuskan penelitian dengan berlandaskan pada teori yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep

*pressure groups* untuk untuk mengevaluasi dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian ini. *Pressure groups* merupakan organisasi kolektif yang terdiri dari anggota, baik individu maupun organisasi, yang berusaha mempengaruhi dan membentuk kebijakan publik. Berbeda dengan partai politik, *pressure groups* tidak berupaya memenangkan pemilihan atau membentuk pemerintahan. Mereka menggunakan strategi untuk mempengaruhi parlemen, menteri pemerintah, pegawai publik, platform partai, dan opini publik agar kebijakan publik berubah ke arah yang diinginkan (atau tetap tidak berubah sesuai keinginan). Sebagai aturan umum, jika suatu organisasi memiliki advokasi kebijakan sebagai bagian dari alasan keberadaannya dan merupakan organisasi kolektif (memiliki anggota atau pendukung), maka dapat dianggap sebagai *pressure groups* (Halpin 2012, 179).

Perhatian terhadap *pressure groups* berbeda dari perhatian yang diberikan pada partai politik, politik legislatif, dan pemilu di Australia. Ini disebabkan oleh pandangan lama dalam studi politik Australia yang menganggap sistem parlementer sebagai sumber utama kekuasaan politik. Halpin dalam tulisannya, menyatakan bahwa kehadiran *pressure groups* semakin penting dalam kehidupan politik Australia, mereka dapat mewakili kepentingan yang terpinggirkan dan tidak disukai secara politik. Kedudukan partai dalam sistem politik Australia didasarkan pada kompetisi, sehingga perubahan pemerintahan dapat membawa perubahan besar dalam kebijakan publik. Dengan demikian, maka *pressure groups* akan memiliki alasan kuat untuk langsung menargetkan partai agar kebijakan mereka dimasukkan dalam lebih didengar (Halpin 2012, 180). *Pressure group* dalam hubungan internasional mengkaji bagaimana

kelompok-kelompok terorganisir mempengaruhi kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan dalam suatu pemerintahan. Kelompok tersebut dianggap sebagai *interest group* dan *pressure group*, beroperasi di luar partai politik formal dan fokus pada isu-isu spesifik untuk mengadvokasi kepentingan mereka (Dilon 1942).

Kebutuhan akan *pressure groups* ini muncul seiring dengan perubahan dinamika demokrasi. *Pressure Groups* dapat mewakili berbagai kepentingan, berskala lokal, sektoral, atau nasional. Kata "*pressure*" dari *Pressure Groups* berasal dari organisasi opini publik yang diarahkan terhadap suatu lembaga pemerintah. *Pressure Group* terbagi menjadi dua jenis yaitu *associative pressure groups*, dibentuk berdasarkan kepentingan atau tujuan tertentu, mengadvokasi perubahan dalam undang-undang atau kebijakan publik. Sementara *institutional pressure groups*, yang terdiri dari para profesional dalam struktur pemerintahan yang berusaha mempengaruhi kebijakan melalui cara-cara konstitusional (Biswas 2020). *Pressure groups* adalah ekspresi modern dari demokrasi oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan membentuk opini publik menjadi kekuatan dinamis untuk membentuk kebijakan pemerintah.

Strategi *pressure group* menurut Halpin dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu strategi *insider* dan *outsider*. Strategi *insider* umumnya melibatkan negosiasi langsung dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk mencapai hasil yang diinginkan, biasanya melibatkan penyampaian argumen yang logis dan berbasis penelitian, tanpa merendahkan pemerintah. Kelompok yang menerapkan strategi ini menyadari bahwa mereka tidak selalu bisa "menang" dalam setiap isu. Pendekatan ini bisa bersifat terbuka atau tertutup, tergantung pada seberapa banyak media meliput suatu isu. Sementara strategi *outsider* lebih mengandalkan opini publik dan aksi

langsung untuk mempengaruhi kebijakan, strategi ini lebih dikenal dengan aksi-aksi yang menarik perhatian untuk mengubah agenda kebijakan dan mendorong pemerintah bertindak. *Pressure groups* yang memilih strategi ini biasanya karena tujuan mereka terlalu ekstrem untuk diterima oleh pemerintah. Kedua strategi tersebut mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik sesuai dengan tujuan masing-masing kelompok (Halpin 2012, 181).

Adapun beberapa strategi *outsider* yang dapat digunakan para kelompok tekanan untuk mencapai tujuannya yaitu dengan melakukan lobi, kampanye kesadaran dalam pemilu, hingga propaganda. Lobi merupakan metode representasi formal yang digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk berkomunikasi, mempengaruhi atau mendorong anggota parlemen atau pejabat pemerintah lainnya untuk mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan kepentingan kelompok, terlepas dari sikap awal mereka. Tujuan utama lobi lebih sekedar mengubah opini publik, melainkan untuk secara langsung mempengaruhi keputusan-kebijakan yang diambil oleh para pengambil kebijakan. Lobi sebagai titik kontak antara *pressure groups* dan legislator atau pejabat pemerintah lainnya. Lobi memanfaatkan dukungan yang ada, baik dari segi finansial maupun opini publik, tanpa menciptakan dukungan baru (Dillon 1942, 476).

Dalam tulisan *pressure group and lobbying* oleh Darren Halpin, terdapat bahasan mengenai *lobbying* dan *lobbyists* yang dilakukan oleh kelompok tekanan untuk mempengaruhi kebijakan publik. *Lobbying* didefinisikan sebagai usaha mempengaruhi keputusan politik, yang melibatkan berbagai organisasi dan individu. *Lobbyists*, seringkali mantan politisi atau pegawai negeri, berperan sebagai

penghubung antara kelompok kepentingan dan pengambil keputusan, serta menyediakan data riset untuk mendukung advokasi. Di Australia, meskipun ada regulasi, banyak *lobbyists* yang tidak terdaftar karena skema pendaftaran hanya mencakup *lobbyists* komersial. Lobi oleh *pressure groups* sangat terlihat dan penting dalam menentukan agenda politik Australia. Oleh karena itu, kelompok-kelompok ini layak mendapatkan perhatian lebih dalam penelitian, terutama terkait dengan pengaruh mereka terhadap kebijakan publik di Australia (Halpin 2012, 184-186).

Dalam kategori *election*, *pressure groups* merupakan bagian dari sistem politik yang memungkinkan jenis partisipasi baru dari rakyat dalam legislatif dan administrasi. Dengan mendorong minat masyarakat yang berkelanjutan terhadap pemerintahan, tidak hanya pada saat pemilihan, tetapi juga di antara pemilihan. *Pressure groups* membentuk opini publik menjadi kekuatan dinamis yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, *pressure groups* merupakan ekspresi demokrasi modern oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebuah kelompok tekanan dikenal dapat memengaruhi pemilu dengan melibatkan dukungan terhadap calon yang menguntungkan kepentingan kelompok dan mendorong mereka untuk terpilih dalam jabatan publik (Dilon 1942, 481).

Demikian pula, *pressure groups* menggunakan propaganda sebagai sarana untuk mempengaruhi opini publik untuk secara tidak langsung mempengaruhi pemerintah, karena pemerintah dalam demokrasi dipengaruhi oleh sentimen publik. Propaganda telah didefinisikan sebagai manipulasi simbol untuk mempengaruhi opini publik ke arah sudut pandang tertentu. Profesor Childs mendefinisikan propaganda sebagai penyebaran ide, prinsip, dan doktrin, atau untuk memajukan, melanjutkan,

mempromosikan, atau menyebarluaskan ide-ide. Propaganda yang digunakan oleh *pressure groups* untuk mempengaruhi opini publik, melibatkan media seperti surat kabar, siaran radio, pertemuan massa, penyebaran pamflet, buklet, dan bahkan jamuan teh serta resepsi publik. Prosedur yang sehat dan demokratis dalam propaganda adalah dengan tidak mengandung kebohongan, tidak membuat pemalsuan, tetapi yang jujur dalam menyajikan argumen. Oleh karena itu, propaganda yang etis adalah instrumen yang sah bagi *pressure groups* untuk membentuk opini publik (Dilon 1942, 476).

APAN memiliki indikator kuat sebagai aktor yang meliputi NGO, media, aktivis yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dunia, menyelidiki dan melaporkan pelanggaran Hak Asasi Manusia tentang isu-isu Palestina, membuat pemerintah dan aktor lain semakin bertanggung jawab atas perbuatan mereka, serta mempromosikan perubahan sosial dan politik. *Pressure groups* memiliki peran yang beragam dalam sistem politik, salah satunya berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan menyampaikan aspirasi publik secara terbuka dan jujur. Dalam menjalankan fungsinya, *pressure groups* yang baik harus berlandaskan pada etika dan fakta, serta menghindari tindakan yang bersifat manipulatif atau radikal.

### **1.7. Argumen Sementara**

APAN terdiri dari berbagai organisasi dan individu di Australia yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta solidaritas terhadap Palestina. APAN termasuk dalam kategori *pressure groups*, karena merupakan organisasi non-partisan yang mewakili segmen tertentu dari masyarakat untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan melalui

opini publik. Peralihan kekuasaan dari Partai Liberal ke Partai Buruh membawa harapan baru bagi APAN, mengingat komitmen ALP untuk menerapkan kebijakan yang lebih moderat dan berfokus pada *two state solution*, berbeda dengan pemerintahan Liberal sebelumnya yang konservatif. Keberhasilan ini terlihat pada tahun 2022, ketika pemerintahan di bawah Anthony Albanese membatalkan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, yang sebelumnya diakui oleh pemerintahan Scott Morrison. Dengan demikian, APAN semakin optimis dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina, meskipun masih menghadapi tantangan seperti tekanan dari kelompok pro-Israel dan dinamika politik domestik. Melalui gerakan advokasinya, APAN berupaya meningkatkan perhatian publik dan mempengaruhi kebijakan Pemerintah Australia agar lebih mementingkan keadilan, hak asasi manusia, dan hukum internasional.

Salah satu inisiatif APAN adalah peluncuran *Major Parties Scorecard*, yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan calon legislatif mengenai isu Palestina melalui kampanye dan pemeringkatan partai. Inisiatif ini memberikan informasi yang membantu pemilih dalam membuat keputusan yang mendukung kebijakan luar negeri yang lebih adil terhadap Palestina. Hal ini terbukti dengan kekalahan beberapa calon pendukung Israel di Parlemen, sementara kandidat yang didukung oleh *Climate 200*, yang memiliki pandangan lebih kritis terhadap Israel, berhasil menang. Dengan menyadari bahwa sistem pemilu Australia yang singkat mendorong legislator untuk memperhatikan reputasi mereka di hadapan publik, APAN juga aktif di platform media sosial dan situs web resminya untuk menggalang dukungan dari generasi muda. Kampanye ini berhasil menjangkau ribuan orang, memicu diskusi di kalangan pemuda Australia, dan meningkatkan kesadaran mengenai

isu Palestina di masyarakat yang lebih luas. Hasil dari kampanye ini terlihat dalam peningkatan partisipasi publik dalam demonstrasi dan acara yang mendukung Palestina. Dengan demikian, APAN berperan sebagai jembatan antara masyarakat sipil dan pembuat kebijakan melalui strategi lobi, kampanye kesadaran, dan propaganda.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penulis akan menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif atau mengumpulkan data sedalam-dalamnya untuk dapat menjelaskan suatu permasalahan yang akan diambil. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, data sekunder digunakan untuk menganalisis terkait upaya APAN dalam Mendorong Komitmen Pemerintah Australia terhadap konflik Israel-Palestina tahun 2019-2024. Data ini diperoleh dari sumber-sumber kredibel seperti situs web resmi, jurnal-jurnal terpercaya, buku-buku terkait, laporan resmi, dan berita yang dapat dipercaya. Langkah pertama sebelum melakukan penelitian adalah merumuskan masalah yang akan diteliti. Peneliti juga memverifikasi bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya atau memiliki aspek yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

### **1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, subjek yang dibahas adalah upaya APAN, sementara objek penelitian adalah komitmen pemerintah Australia terhadap konflik Israel-Palestina dalam periode 2019-2024.

### **1.8.3 Metode Pengumpulan Data**

Data sebuah penelitian kualitatif didapatkan dari dokumen yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, berupa tulisan, gambar, maupun tabel baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik, mengenai berbagai usaha yang telah dilakukan oleh APAN dalam mendorong komitmen Pemerintah Australia konflik Israel-Palestina. Penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber terdahulu maupun yang sudah ada dan dianggap relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian.

### **1.8.4 Proses Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengikuti beberapa tahap. Tahap pertama akan mencakup penyusunan bab utama yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumentasi sementara, serta metode penelitian. Setelah itu, peneliti telah mengumpulkan data secara menyeluruh dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan, seperti buku, jurnal, laporan, berita, dan tautan web resmi yang membahas APAN. Dari data-data yang sudah didapatkan, penulis akan menganalisis terlebih dahulu mengenai studi kasus yang berkaitan dengan upaya APAN dalam mempengaruhi kesadaran publik dan kebijakan politik Australia pada tahun 2019 hingga 2024. Setelah itu peneliti akan menyajikan data tersebut dengan bab maupun sub bab yang telah ditetapkan. Sehingga pada proses penelitian terakhir, penulis membuat kesimpulan maupun saran dari hasil penelitian.

## 1.9. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan diuraikan secara terperinci dalam empat bab utama:

- a. Bab pertama akan memperkenalkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumentasi awal, serta metodologi penelitian.
- b. Bab 2 fokus pada pokok-pokok penting yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis perkembangan kondisi konflik Israel-Palestina periode 2019-2024 serta respon Australia terhadap peristiwa tersebut. Kemudian menganalisis kebijakan Pemerintah Australia dari periode 2019 hingga 2024 terhadap isu Israel-Palestina, termasuk perbandingan kebijakan *Australian Labor Party* dan *Liberal Party* terhadap isu tersebut.
- c. Bab 3 peneliti menjelaskan gerakan APAN di Australia seperti profil dan upaya APAN, serta pengaruh gerakan APAN dalam konteks Australia hingga global, implementasi konsep *pressure group* untuk menjelaskan upaya APAN dan kontribusi APAN dalam mendorong komitmen pemerintah Australia terhadap konflik Israel-Palestina tahun 2019-2024 hingga perkembangan perubahan kebijakan Australia.
- d. Bab 4 menyajikan rangkuman dari semua pembahasan dalam penelitian ini dan menjelaskan tindakan yang telah dilakukan oleh APAN dalam mendorong komitmen pemerintah Australia terhadap konflik Israel-Palestina tahun 2019-2024 dan beberapa rekomendasi yang dibutuhkan terkait pembahasan dari penelitian ini.

## **BAB 2 POSISI PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM ISU ISRAEL-PALESTINA**

### **2.1. Perkembangan konflik Israel-Palestina & respon Australia**

Dalam rentang waktu 2019-2024 terdapat banyak perubahan kebijakan luar negeri Australia yang berkaitan dengan isu Israel-Palestina diantaranya pengakuan Jerusalem, krisis West Bank, sengketa Sheikh Jarrah, hingga kejahatan genosida di Gaza yang saat ini menjalar ke sejumlah wilayah di palestina sejak peristiwa 07 Oktober lalu. Australia turut memberikan pernyataan sikap pada peristiwa-peristiwa tersebut, hal tersebut termasuk upaya dalam mencerminkan komitmen Australia untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan sambil memperjuangkan hak-hak komunitas yang terdampak.

Pada akhir 2018, Australia dibawah kepemimpinan Scott Morrison dari Partai Liberal, telah memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Dalam pernyataan *“the aspirations of Palestinians people for a future state with its capital in East Jerusalem”*, walaupun dalam pernyataan tersebut terdapat perbedaan dengan langkah Amerika Serikat setahun sebelumnya, yang secara spesifik hanya menyebut Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel secara keseluruhan. Trump menegaskan bahwa Yerusalem adalah pusat pemerintahan Israel, tempat kedudukan legislatif, mahkamah agung, serta kantor Perdana Menteri dan Presiden Israel (Alkhshali 2018).

Namun, pada tahun 2022, pemerintah Australia di bawah kepemimpinan ALP membatalkan keputusan pendahulunya untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, Karena Australia ingin menegaskan bahwa permasalahan atas Yerusalem harus diselesaikan dalam negosiasi damai antara Israel dan Palestina. Pemerintah

Albanese fokus pada upaya mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan, serta ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak merusak kemungkinan perdamaian (Australian Minister for Foreign Affairs 2022). Selain itu, pemerintah juga menyadari pentingnya memberikan dukungan kepada rakyat Palestina dan kembali mendorong negosiasi perdamaian yang konstruktif, hal tersebut memicu teguran dari pemerintah Israel. Wong mengatakan bahwa Australia berkomitmen pada *two state solution* yang mana Israel dan Palestina di masa depan hidup berdampingan, dalam damai dan aman, dalam batas-batas yang diakui secara internasional (Greene 2022).

Sebagian besar warga Palestina di Australia mendukung kebijakan baru pemerintah Albanese. Kedutaan besar Palestina de facto di Australia mengeluarkan pernyataan yang kuat mendukung keputusan tersebut. Aktivis Palestina Australia, Fahad Ali, mengapresiasi keputusan pemerintah yang membalikkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengakui suara minoritas Palestina yang sering terabaikan. Perubahan kebijakan ini mencerminkan perubahan sikap yang lebih luas di Australia terkait Israel dan Palestina. Partai Buruh Victoria, cabang semi-otonom dari Partai Buruh Australia, semakin menekan Albanese untuk mengakui negara Palestina dalam masa jabatan ini. Survei YouGov 2022 menunjukkan mayoritas orang Australia mendukung pengakuan Palestina sebagai negara (Napach 2023).

Sheikh Jarrah, sebuah kawasan di Yerusalem Timur, menjadi pusat sengketa mengenai kepemilikan properti, yang memicu ketegangan signifikan antara warga Palestina dan pemukim Israel. Perjuangan hukum atas rumah-rumah di Sheikh Jarrah telah berlangsung sejak 2019, dengan organisasi pemukim Israel, seperti *Nahalat Shimon International*, mengajukan kasus untuk mengusir keluarga-keluarga Palestina.

Pada 2021, beberapa keluarga dihadapkan pada perintah pengusiran dari rumah mereka, yang sudah mereka huni selama puluhan tahun. Kasus-kasus ini dijadwalkan untuk diproses oleh Mahkamah Agung Israel, namun sidang sering kali ditunda di tengah ketegangan yang meningkat (Al-Haq 2021). Pada 6 Mei 2021, protes terhadap pengusiran berubah menjadi kekerasan saat bentrokan terjadi antara warga Palestina dan pemukim Israel. Ketegangan ini berkembang menjadi kekerasan lebih luas di seluruh Yerusalem dan akhirnya memicu konflik bersenjata antara Israel dan Hamas. Situasi ini ditandai dengan kehadiran polisi dan penggunaan alat pengendali massa seperti gas air mata terhadap para pengunjung rasa (Osman 2021).

Situasi tersebut mengundang perhatian internasional ketika ancaman pengusiran turut meningkatkan kekerasan, aksi protes semakin memanas di Sheikh Jarrah, berujung pada bentrokan dengan polisi dan pemukim. Ketegangan ini menjadi bagian dari eskalasi yang lebih luas yang turut berkontribusi pada krisis Israel-Palestina 2021, yang berujung pada kekerasan besar antara Israel dan Hamas. Setelah peristiwa Mei 2021, ketegangan di Sheikh Jarrah tetap tinggi. Polisi Israel sering membatasi akses warga Palestina ke kawasan tersebut, sementara pemukim Israel diberikan kebebasan untuk bergerak. Hal ini menyebabkan protes yang berkelanjutan dan penangkapan aktivis Palestina (Bowen 2021).

Australia turut mengambil sikap terhadap pengusiran keluarga Palestina dari Sheikh Jarrah, *Australian Centre for International Justice*, bersama dengan 191 organisasi hak asasi manusia lainnya, mendukung surat dari keluarga Palestina di Sheikh Jarrah yang mendesak *International Criminal Court (ICC)* untuk menyelidiki pengusiran paksa di Yerusalem Timur. Surat tersebut menyoroti bahwa pengusiran ini

bisa dianggap sebagai kejahatan perang dan mendesak tindakan segera untuk melindungi hak-hak warga yang terancam dipindahkan (Australia Center for International Justice 2021). Hal tersebut menunjukkan dukungan Australia untuk penyelidikan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dan kecaman publik terhadap praktik pengusiran.

West Bank turut mengalami pergolakan yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penurunan ekonomi. Israel memegang kendali penuh atas sumber daya utama di Tepi Barat, Israel mengalihkan air dari kota-kota dan desa-desa Palestina ke pemukiman ilegal Yahudi. Akibatnya, terjadi krisis air terus-menerus di wilayah yang diduduki, yang sengaja diperburuk oleh otoritas kolonial sejak 7 Oktober 2023 dengan membatasi pasokan air lebih ketat (Jaber 2024). Meskipun tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat mendapat kecaman luas dari komunitas internasional, intervensi yang dilakukan terbatas. Seruan untuk pertanggungjawaban terkait pelanggaran hak asasi manusia belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Pada pertengahan 2024, operasi IDF telah meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan peningkatan penggunaan senjata berat terhadap warga sipil.

Pada Juli 2024, Australia memberlakukan sanksi finansial dan larangan perjalanan terhadap tujuh pemukim Israel yang terlibat dalam serangan kekerasan terhadap warga Palestina di West Bank. Langkah ini mengikuti putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa pemukiman Israel di wilayah yang diduduki adalah ilegal menurut hukum internasional. Penny Wong menegaskan posisi Australia bahwa pemukiman semacam itu merusak upaya perdamaian dan mendesak Israel untuk

menghentikan aktivitas tersebut serta meminta pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap Palestina (Al Jazeera 2024).

Hingga saat ini, serangan Israel terhadap Palestina masih terus berlanjut, dengan intensitas yang semakin meningkat, terutama sejak 7 Oktober 2023, ketika Israel melancarkan serangan militer besar-besaran di Jalur Gaza. Tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan genosida, yang bukan hanya berupa serangan atau kekerasan yang terjadi secara mendadak, melainkan merupakan proses yang terorganisir dan sistematis yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok etnis, ras, bangsa, atau agama tertentu (Rosenberg 2012). Dalam beberapa bulan terakhir, situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk, dengan kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan yang semakin parah. Bantuan kemanusiaan yang sampai ke Gaza masih sangat terbatas dan dihadapkan pada berbagai kesulitan dalam hal distribusi serta ancaman keamanan.

Konflik Israel-Palestina kini menjadi isu yang memecah di Australia, sedangkan sebelumnya tidak terlalu sensitif dalam politik negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh kebijakan luar negeri Australia yang lebih condong kepada Israel, yang didasarkan pada hubungan sejarah yang kuat antara Australia dan Israel. Australia, yang memiliki hubungan erat dengan Israel sejak mendukung Rencana Pembagian PBB 1947 dan menjalin hubungan diplomatik pada 1949 (Ministry of Foreign Affairs 2024). Kedua negara memiliki hubungan ekonomi, pertahanan, dan antarmasyarakat yang kuat, termasuk kerja sama dalam inovasi teknologi, keamanan siber, dan dialog tahunan antara pejabat pertahanan serta anggota parlemen senior. Selain itu, Australia juga berusaha menjaga hubungan strategis dengan sekutu

seperti Amerika Serikat, yang berpengaruh pada dukungan Australia terhadap kebijakan Israel di forum internasional. Kemudian, kurangnya tekanan publik untuk mendukung hak-hak Palestina membuat masyarakat Australia kurang peka terhadap isu ini. Meskipun mendukung *two state solution* untuk konflik Israel-Palestina, Australia tetap memberikan bantuan ke Palestina, seperti AU\$17,1 juta untuk 2022-2023, serta kontribusi untuk *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dan *Official Development Assistance* (ODA) (Napach 2023).

## **2.2. Posisi Australia terhadap konflik Israel-Palestina**

Peralihan kekuasaan di Australia dari Partai Liberal ke Partai Buruh Australia mencerminkan dinamika dalam sistem pemerintahan yang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan publik. Australia menganut sistem pemerintahan parlementer yang memadukan elemen-elemen tradisional dari monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer (Kedutaan Besar Australia Indonesia, n.d.). Partai Liberal dan Partai Buruh merupakan dua kekuatan utama dalam sistem politik Australia, dengan masing-masing membawa gaya politik yang berbeda. Dalam konteks ini, Partai Liberal yang sebelumnya berkuasa memiliki pendekatan konservatif terhadap kebijakan luar negeri dan domestik, termasuk sikap yang lebih mendukung Israel dalam konflik Israel-Palestina. Sebaliknya, Partai Buruh, yang dipimpin oleh Anthony Albanese, berkomitmen untuk mengambil pendekatan yang lebih moderat, dengan fokus pada solusi dua negara dan mengedepankan dialog internasional yang lebih luas.

Kebangkitan kembali konflik Israel-Palestina jelas berdampak besar pada lanskap global, mempengaruhi politik dan ekonomi dunia. Sebagai respons terhadap ketegangan yang sedang berlangsung, negara-negara seperti Australia merasa perlu untuk mengevaluasi kembali posisi mereka. Pemerintah Australia yang dipimpin oleh Partai Buruh saat ini mengedepankan pendekatan yang lebih berfokus pada upaya perdamaian yang adil dan berkelanjutan dalam konflik Israel-Palestina. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese, Australia terus menegaskan dukungannya terhadap hak Israel untuk hidup dalam kedamaian dan keamanan, namun juga mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dan hidup dalam damai. Pemerintah Australia berkomitmen pada prinsip *two-state solution* sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik ini. Seiring waktu, perspektif Australia terhadap konflik ini telah berevolusi, dengan kebijakan luar negerinya kini lebih menekankan pada pencarian resolusi damai melalui negosiasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun Australia sering menghadapi kritik internasional atas kebijakannya yang dianggap lebih condong ke Israel, dalam beberapa tahun terakhir, Australia telah memprioritaskan pentingnya diplomasi internasional dan inisiatif konstruktif dalam mendukung peran PBB dan aktor regional lainnya untuk memfasilitasi perdamaian (Australian Minister for Foreign Affairs 2023).

Dalam sistem pemerintahan Australia, partai politik memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan, tetapi keberhasilan suatu pemerintahan juga sangat dipengaruhi oleh berbagai kelompok kepentingan yang ada di masyarakat, mulai dari kepentingan pedesaan, komersial, industri, hingga kelompok lobi (Moon and Sharman

2003). Kemenangan Albanese dan Partai Buruh dalam pemilihan 2022 memberikan kesempatan untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung hak-hak Palestina dan melakukan perubahan dalam pendekatan Australia terhadap konflik Israel-Palestina. Namun, dilihat dari perdebatan mengenai resolusi Partai Buruh Queensland, tidak semua bagian dari Partai Buruh sepakat mengenai arah kebijakan tersebut, terutama dalam hal mendukung solusi yang lebih keras terhadap Israel (Newsdesk 2021).

Dalam hubungan dengan Israel, pemerintah Australia, terutama saat di bawah Perdana Menteri Partai Liberal seperti Tony Abbott, Malcolm Turnbull, dan Scott Morrison, sangat mendukung Israel, termasuk kebijakan pro-Israel di PBB dan pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Kebijakan ini, meskipun menuai kritik domestik, tetap digambarkan sebagai mendukung Israel sebagai "mercusuar demokrasi" di Timur Tengah. Pada masa pemerintahan Kevin Rudd (2007-2013), meskipun mengkritik pemukiman Israel di Yerusalem Timur, ia tetap mendukung Israel dan mengecam boikot produk Israel oleh Green Party. Setelah menjabat, Rudd lebih mendukung Palestina dan menyerukan pengakuan negara Palestina pada 2017. Perdana Menteri Julia Gillard adalah pendukung Israel yang kuat, menerima Penghargaan Yerusalem pada 2013 dan mendukung Israel dalam pemungutan suara PBB untuk negara Palestina (Napach 2023).

Saat Anthony Albanese terpilih sebagai perdana menteri Australia pada *election* tahun 2022 lalu, sebagian dari pemilihnya ingin menyingkirkan pertahanan Scott Morrison dan pemerintahan konservatifnya dari jabatannya. Kemenangan Albanese ini menandai kembalinya Partai Buruh ke tampuk kekuasaan di Australia setelah hampir

satu dekade berada di luar pemerintahan. Pergantian kepemimpinan ini tidak hanya penting bagi politik domestik Australia, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan di tingkat internasional, dengan banyak pihak yang memperhatikan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah baru di bawah kepemimpinan Albanese. APAN berharap bahwa pemerintahan baru dibawah Anthony Albanese akan menghasilkan dampak positif, terutama dalam hal pengakuan terhadap Palestina, meskipun rincian pengakuan tersebut belum jelas. APAN juga berharap ada dukungan untuk penyelidikan oleh ICC terkait kejahatan perang di Palestina, serta pemulihan pendanaan bantuan luar negeri. Namun, terdapat pernyataan bahwa Partai Buruh secara historis tidak mendukung Palestina sebanyak politisi individu atau partai kecil, dan tidak bisa diharapkan banyak pada perubahan yang signifikan dalam sikap partai tersebut (McCabe and Australia Palestine Advocacy Network 2022).

Pemimpin Partai Buruh Australia memiliki sikap bervariasi terhadap konflik Israel-Palestina, namun terkadang cenderung mendukung Israel. Pemerintahan Albanese saat ini terlihat membuat kebijakan condong ke Palestina dengan membatalkan pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, mendukung resolusi PBB yang mengkritik kebijakan pemukiman Israel, serta meningkatkan bantuan untuk UNRWA. Albanese juga mulai menggunakan istilah "*Occupied Palestinian Territories*" untuk West Bank dan Gaza, menyatakan Israel melakukan penindasan sistemik terhadap Palestina, dan berkomitmen memperkuat penolakan terhadap pemukiman Israel yang ilegal. Menteri Luar Negeri Penny Wong mengakui perubahan kebijakan Australia terhadap Israel dan Palestina, menyatakan bahwa Australia sedang menyeimbangkan kembali pendekatannya, namun tetap menjadi sahabat besar Israel.

Setelah pemerintahannya mulai menggunakan istilah "*Occupied Palestinian Territories*", Perdana Menteri Albanese juga menegaskan bahwa Australia tetap pendukung kuat Israel. Namun, banyak kelompok Yahudi di Australia yang menentang kebijakan ini, merasa Australia tidak bisa menjaga keseimbangan antara mendukung Palestina dan tetap menjadi sekutu kuat Israel. *The Executive Council of Australian Jewry* (ECAJ) menganggap pembalikan pengakuan terhadap Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel sebagai "penghinaan terhadap sekutu utama", sementara Federasi Zionis Australia menilai keputusan ini berlawanan dengan tujuan. Meski demikian, ada kelompok Yahudi yang mendukung pendekatan lebih seimbang terhadap Israel-Palestina (Napach 2023).

Terdapat beberapa resolusi terkait *Peaceful settlement of the question of Palestine*, yang diadopsi oleh UNGA. Resolusi A/RES/56/36, yang diadopsi pada 5 Desember 2001, resolusi ini menekankan perlunya penyelesaian yang adil dan komprehensif untuk masalah Palestina dan mengulangi dukungan untuk hak-hak rakyat Palestina. Resolusi A/RES/57/23, diadopsi pada 20 November 2002, resolusi ini mengulangi dukungan untuk hak-hak rakyat Palestina dan menyerukan penghentian semua tindakan kekerasan serta perlunya dialog untuk mencapai perdamaian. Kemudian Resolusi A/RES/58/29, diadopsi pada 17 Desember 2003, resolusi ini menekankan pentingnya penyelesaian dua negara dan menyerukan dukungan internasional untuk proses perdamaian di Timur Tengah. Serta Resolusi A/RES/59/29 yang diadopsi pada 2 Desember 2004, untuk menegaskan kembali hak-hak rakyat Palestina dan menyerukan penghentian semua tindakan yang merugikan proses perdamaian (UN Digital Library, n.d.).

Resolusi tersebut mencerminkan komitmen PBB untuk mendukung penyelesaian damai atas konflik Israel-Palestina, menekankan pentingnya hak-hak rakyat Palestina, menyatakan bahwa baik Israel maupun Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, serta hak-hak yang tidak dapat dicabut dari Palestina harus dihormati dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka, bahwa pembangunan tembok di wilayah Palestina yang terjajah serta program perluasan pemukiman Israel melanggar hukum internasional. Dalam pemungutan suara di PBB mengenai resolusi utama '*Peaceful settlement of the question of Palestine*', Australia telah berubah dari 'tidak hadir' pada 2001 dan 2003, menjadi 'setuju' pada 2002, hingga konsisten 'tidak setuju' sejak 2004 (Han 2010).

Australia telah secara konsisten menolak resolusi PBB mengenai penyelesaian damai untuk masalah Palestina sejak 2004. Ross Burns, mantan Duta Besar Australia untuk Israel, berpendapat bahwa Australia seharusnya mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang, karena dengan membiarkan konflik Palestina terus berlanjut, Australia sebenarnya mengabaikan peringatan mengenai 'perang melawan teror' (Burns 2007, 11). Australia telah lama mengklaim memiliki pendekatan yang seimbang dan netral terhadap konflik Israel-Palestina, dengan hubungan umumnya dengan Timur Tengah didasarkan pada posisi netralitas yang ketat. Namun, dukungan kuat Australia terhadap Amerika Serikat (AS) dalam isu-isu terkait Israel mempertanyakan klaim kenetralannya tersebut. Mansouri berpendapat bahwa hubungan Australia dengan Timur Tengah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan ideologis melalui hubungan luar negeri Australia, yang disertai dengan rasa identitas yang cenderung lemah (Han 2010).

Secara historis, pada 2004, platform nasional ALP menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Israel dan Palestina, dengan pendekatan yang mendasarkan pada hukum internasional. Partai Buruh mendukung negosiasi berdasarkan resolusi PBB dan mengecam tindakan yang menghambat perdamaian dari kedua belah pihak. Namun, pada 2007, pernyataan mereka mengenai proses perdamaian jauh lebih singkat, tanpa menyebutkan hukum internasional atau komitmen untuk perdamaian yang adil. Pada 2009, Partai Buruh kembali menyatakan dukungannya terhadap *two-state solution* yang adil, serta inisiatif perdamaian terbaru untuk Israel dan Palestina. Kebijakan pemerintah Australia yang mendukung *two-state solution*, namun menentang hak-hak Palestina di PBB menunjukkan inkonsistensi antara nilai yang dipegang dan tindakan yang diambil. Hal ini menjadi kontradiktif, karena untuk mendukung *two-state solution*, Australia harus mendukung hak Palestina untuk membentuk negara yang layak. Selain itu, dukungan terhadap inisiatif perdamaian terbaru juga menunjukkan ketidaksiapan Australia untuk menghadapi kegagalan proses perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat, serta pengabaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada saat ini (Han 2010).

Pada platform konferensi nasional ALP tahun 2021, mendukung pengakuan dan hak Israel dan Palestina untuk eksis sebagai dua negara dengan batas wilayah yang aman dan diakui, menyerukan kepada Pemerintah Buruh berikutnya untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara, dan mengharapkan bahwa isu ini akan menjadi prioritas penting bagi Pemerintah Buruh berikutnya (Australian Labor Party 2021).

Dapat dikatakan, pendekatan Australia terhadap proses perdamaian Israel-Palestina merupakan isu terpenting yang harus ditangani ketika menjalin hubungan

dengan Timur Tengah. Respon politik Australia terhadap proses perdamaian penting dalam dua hal, pertama, Australia memainkan peran utama dalam pembentukan Negara Israel dan memimpin komite yang menangani isu Israel-Palestina. Australia juga merupakan pemerintah pertama yang memberikan pengakuan *de jure*, yaitu pengakuan penuh, dan bukan sekadar pengakuan *de facto*, kepada negara Israel yang baru (Adelman 1992).

Kemenangan Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri Australia mengindikasikan perubahan dalam pendekatan negara tersebut terhadap kedaulatan Palestina. Meskipun pada awal kariernya Albanese menunjukkan solidaritas terhadap Palestina, termasuk mengecam agresi Israel di Gaza dan menentang keputusan pemerintah Australia terkait hak asasi manusia Palestina, belakangan ia tampaknya mengadopsi posisi yang lebih moderat. Dalam beberapa tahun terakhir, Albanese lebih fokus pada upaya untuk mencapai penyelesaian damai antara Israel dan Palestina, dengan menekankan pentingnya solusi dua negara. Ia juga mengurangi dukungannya terhadap kampanye BDS terhadap Israel, dan bahkan menentang upaya dewan lokal untuk mendukung BDS di Sydney pada 2021. Secara keseluruhan, meskipun Albanese masih mendukung *two state solution*, ia cenderung menjauh dari pendekatan yang lebih keras terhadap Israel dan lebih menekankan dialog serta upaya penyelesaian konflik secara damai (McCabe and Australia Palestine Advocacy Network 2022).

Pada tahun 2022, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menegaskan kembali “*previous and long-standing position*” menekankan dukungan teguh pemerintah Buruh yang baru bagi Israel dan rakyat Palestina. Pemerintah Albanese mengkonfirmasi komitmen Australia untuk mendukung upaya internasional dalam

mencapai *two state solution* yang adil dan langgeng. Australia tetap mendukung Israel sebagai sahabat setia, seperti yang telah dilakukan sejak pengakuan pertama terhadap Israel di bawah Perdana Menteri Ben Chifley. Australia juga terus mendukung Palestina, memberikan bantuan kemanusiaan sejak 1951 dan mendorong dimulainya kembali perundingan perdamaian. Wong menyayangkan keputusan Pemerintah Morrison yang mengubah posisi Australia, yang berdampak pada penderitaan banyak orang di komunitas Australia yang peduli terhadap isu ini (Australian Minister for Foreign Affairs 2022).

Menjelang Konferensi Nasional Partai Buruh Australia Agustus 2023, para pemimpin partai berusaha menghindari mosi yang dapat mempermalukan pemerintahan Albanese, terutama terkait Israel-Palestina dan AUKUS (Australia-United Kingdom-United States). Setelah Partai Buruh mendukung status negara Palestina pada 2021, ada spekulasi bahwa faksi kiri akan menuntut resolusi terkait Palestina sebagai imbalan agar AUKUS tidak dipermasalahkan. Namun, Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Albanese menegaskan mereka tidak ingin konferensi menentukan kebijakan luar negeri, menentang resolusi yang terlalu mengatur tentang AUKUS dan Palestina. Meskipun Partai Buruh Australia berhasil menghindari pertikaian merugikan terkait Israel dan Palestina di konferensi nasionalnya, perdebatan yang memanas menjelang acara tersebut mengungkapkan adanya perpecahan yang semakin dalam di Australia mengenai masalah yang dulunya dianggap bipartisan. Alih-alih meningkatkan tekanan pada pemerintah Albanese untuk mengakui negara Palestina, Konferensi Partai Buruh 2023 tidak membahas resolusi atau amandemen terkait Israel dan Palestina. Sebagai gantinya, sayap kiri dan kanan Partai Buruh

masing-masing menyampaikan pidato tentang konflik Israel-Palestina. Meskipun kebijakan Australia mengenai Israel dan Palestina semakin memecah, kebijakan tersebut masih sejalan dengan “*Australia's wealthy Western allies*” (Napach 2023).

Posisi resmi Partai Buruh Australia pada tahun 2023 adalah mendukung "jeda kemanusiaan" untuk memberikan bantuan kepada warga Gaza, seperti makanan, air, dan pasokan medis, namun menolak gencatan senjata permanen karena dianggap memberi kesempatan bagi Hamas untuk merencanakan serangan lebih lanjut terhadap Israel. Pernyataan ini memicu protes dari lebih dari 80 kelompok masyarakat Muslim di Australia, termasuk *National Council of Imams* dan *Lebanese Muslim Associations*, yang mengkritik penerangan Gedung Opera Sydney dan Gedung Parlemen Canberra dengan warna-warna yang mereka anggap mendukung Israel. Mereka mengecam abstainnya pemerintah Australia dari resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza, yang mereka sebut sebagai "posisi memalukan" yang bertentangan dengan komitmen Australia terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia (McKinnon 2023).

Nasser Mashni, Presiden Jaringan Advokasi Palestina Australia, menegaskan bahwa masyarakat akan meminta pertanggungjawaban politisi atas kelambanan dan kebungkaman mereka dalam menghadapi kekerasan terhadap warga Palestina. Ia menambahkan bahwa sejarah akan mengingat siapa yang membela hak-hak Palestina dan siapa yang mengabaikannya, yang dapat memperburuk perpecahan dalam masyarakat Australia. Meskipun ada ketegangan terkait kebijakan pemerintah terhadap Israel, tidak ada politisi dari Partai Buruh yang secara terbuka memutuskan hubungan dengan partainya, berbeda dengan situasi di Inggris di mana banyak politisi Buruh

mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Namun, beberapa tokoh terkemuka dari Partai Buruh Australia telah menyuarakan dukungan mereka terhadap Palestina (McKinnon 2023).

Beberapa politisi senior Partai Buruh Australia, seperti Tony Burke, Anne Aly, Ed Husic, dan Fatima Payman, mengkritik tindakan Israel terhadap warga Palestina dan menyerukan gencatan senjata, Payman juga menuntut agar Australia mengutuk pembunuhan warga sipil Palestina oleh Israel. Namun, beberapa tokoh Partai Buruh lainnya, seperti Menteri Pendidikan Jason Clare dan Menteri Perubahan Iklim Chris Bowen, memilih untuk tidak memberikan komentar yang jelas mengenai konflik Israel-Palestina. Di sisi lain, sekitar 40 tokoh Partai Buruh, termasuk mantan pemimpin dan anggota parlemen, menerbitkan surat terbuka yang mendukung Israel dan mengkritik mereka yang tidak mengutuk Hamas. Sebagian anggota parlemen juga mengkritik Tony Burke atas sikapnya yang mendukung Palestina, dengan menyebutnya ceroboh dan melemahkan otoritas Perdana Menteri Albanese serta Menteri Luar Negeri Wong. Aktivis komunitas Muslim, Rahman, menekankan bahwa perubahan signifikan dalam sikap politisi hanya bisa terjadi jika komunitas Muslim dan Arab memberikan tekanan politik yang cukup, dan mengkhawatirkan bahwa politisi kulit putih yang mewakili daerah multikultural mungkin tidak cukup peka terhadap kepentingan komunitas Muslim dan Arab (McKinnon 2023).

Pada Mei 2024, Australia mendukung resolusi PBB yang secara efektif mengakui Palestina sebagai negara anggota penuh. Pemungutan suara ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk membangun momentum perdamaian di tengah konflik yang sedang berlangsung, terutama perang Israel-Hamas. Menteri Luar Negeri

Australia, Penny Wong, menegaskan bahwa dukungan ini bertujuan untuk memberikan hak tambahan yang moderat bagi Palestina dalam forum-forum PBB, bukan pengakuan penuh terhadap kemerdekaan negara Palestina saat ini. Wong juga menyatakan bahwa Australia akan mempertimbangkan pengakuan terhadap Palestina ketika dianggap tepat, dengan tetap mendukung *two state solution* yang dianggap penting untuk perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina (CNN 2024).

Peran Australia dalam resolusi *United Nations Security Council* (UNSC) dan *United Nations General Assembly* (UNGA) terkait konflik Israel-Palestina telah mengalami perkembangan signifikan baru-baru ini. Pada November 2024, Australia memberikan suara mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakui "kedaulatan permanen" rakyat Palestina di wilayah yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan Golan Suriah (Koster 2024). Hal tersebut menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Australia, yang sebelumnya cenderung lebih mendukung posisi Israel. Australia kini bergabung dengan 158 negara lain, termasuk Inggris dan Selandia Baru, dalam mendukung pengakuan terhadap hak-hak Palestina atas sumber daya alam dan kedaulatan mereka. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan bahwa pemungutan suara ini mencerminkan kekhawatiran internasional terkait tindakan Israel, seperti pembangunan permukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina .

Meskipun ada tantangan, APAN merasa optimis karena beberapa faktor utama. Diantaranya dengan kekalahan politisi yang secara terbuka menentang Palestina, seperti Scott Morrison, yang dikenal sebagai sekutu dekat Israel dan yang mendukung pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel meskipun ada pendudukan wilayah

Palestina dan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian, kemenangan kandidat independen dan anggota Green Party yang mendukung penentuan *self-determination* bagi Palestina juga meningkatkan harapan, bersama dengan dukungan yang berkembang di kalangan anggota Partai Buruh Australia terhadap hak-hak Palestina. Serta sebuah jajak pendapat nasional yang menunjukkan bahwa mayoritas publik Australia mendukung pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dan menentang kebijakan pemerintah Australia terhadap wilayah Palestina yang diduduki (McCabe and Australia Palestine Advocacy Network 2022).

Sebagai *Pressure Groups*, APAN memiliki peran penting dalam membangun hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Australia agar lebih sesuai dengan hak-hak rakyat Palestina. APAN bergerak memantau keputusan pemerintah, mengumpulkan dukungan publik, dan menyuarakan kepentingan berbagai kelompok masyarakat. APAN juga berfungsi sebagai saluran untuk sosialisasi politik dan memastikan bahwa pemerintah tetap responsif terhadap opini publik. Dengan cara ini, APAN berkontribusi pada keberlanjutan prinsip-prinsip demokrasi, di mana keputusan pemerintah dapat dipengaruhi oleh kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Biswas 2020).

Dalam menghadapi kritik yang terus meningkat, Menteri Luar Negeri Penny Wong mulai menggunakan bahasa yang lebih tegas, mendesak Israel untuk mematuhi hukum internasional dan aturan perang. Dalam hal ini, Partai Buruh sebagai pemerintah yang sedang berkuasa di Australia harus menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam partainya serta dari kelompok-kelompok lobi yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, dengan tetap menjaga keseimbangan untuk mencapai tujuan yang lebih besar,

yaitu perdamaian dan keadilan global. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Australia, meskipun suatu partai politik dapat berkuasa, kebijakan publik tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal (perbedaan pandangan dalam partai) maupun eksternal (seperti tekanan dari kelompok lobi dan opini publik), yang harus diselaraskan untuk mencapai tujuan pemerintah yang lebih luas. Australia terus menjaga keseimbangan yang rumit dengan mendukung kedua belah pihak sambil mengadvokasi *two-state solution*.

## **BAB 3 APAN DAN PERANNYA DALAM MENGADVOKASI ISU ISRAEL-PALESTINA**

### **3.1. Profil APAN**

APAN didirikan pada Mei 2011 untuk mewakili aspirasi ribuan warga Australia yang prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terus dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. APAN memanfaatkan semangat warga Australia untuk mengadvokasi kebijakan yang mendukung hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan bagi Palestina. Jaringan APAN terdiri dari berbagai organisasi anggota, dengan struktur kepemimpinan yang terdiri dari komite eksekutif yang dipilih dari para anggota. APAN terlibat dalam berbagai kegiatan dan kampanye untuk mempengaruhi kebijakan publik Australia terkait Palestina dan Israel, mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina, dengan fokus khusus pada isu-isu terkait hak asasi manusia, hukum internasional, dan resolusi (Australia Palestine Advocacy Network, n.d.).

Presiden APAN, Nasser Mashni, merupakan seorang keturunan pengungsi Palestina yang mendirikan *Olive Kids*, badan amal Australia untuk anak-anak di Gaza. Wakil Presiden APAN ialah Claire Moore, pernah menjabat sebagai *Shadow Minister for International Development*, senator Queensland selama 17 tahun, serta Claire adalah Presiden Asosiasi PBB di Queensland (Australia Palestine Advocacy Network, n.d.). Anggota APAN sangat beragam dengan latar belakang agama, etnis, ras, profesi, serta kelompok yang berbeda termasuk cakupan *grassroots human rights group*. Selain itu, anggota individu APAN juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, termasuk politisi, pemimpin agama, akademisi, pengacara, mantan politisi, diplomat, pegawai negeri, dan lainnya. APAN membangun jaringan luas melalui kerja sama

dengan berbagai organisasi hak asasi manusia, kelompok keagamaan, dan komunitas diaspora Palestina, serta melibatkan masyarakat dalam kampanye dan pendidikan publik. APAN menawarkan wadah bagi semua warga Australia yang ingin menyuarakan penentangan terhadap penjajahan yang sedang berlangsung di Palestina, serta pendudukan militer ilegal dan brutal yang telah diderita oleh warga Palestina selama beberapa dekade (Australia Palestine Advocacy Network, n.d.).

APAN mengakui bahwa mereka tinggal dan bekerja di atas tanah Aborigin dan Torres Strait Islander yang belum diserahkan. APAN menghormati para Tetua, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, serta peran mereka sebagai penjaga tanah tersebut. APAN juga mengakui perampasan dan kerusakan yang terus menerus dialami oleh masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander akibat penjajahan, dan terinspirasi oleh perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan, hak, budaya, dan penentuan nasib sendiri, dan APAN terinspirasi oleh perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan, hak, budaya, dan penentuan nasib sendiri. APAN berkomitmen untuk mendukung perjuangan mereka, dengan bekerja di masyarakat, di parlemen, dan dengan media untuk mendidik serta mendorong perubahan. APAN mengklaim bahwa mereka berusaha menghubungkan orang-orang di seluruh negeri untuk meningkatkan kesadaran dan memperjuangkan perubahan yang positif (Australia Palestine Advocacy Network, n.d.).

APAN terlibat dalam berbagai kegiatan dan kampanye untuk mempengaruhi kebijakan publik Australia terkait Palestina dan Israel, memiliki pendekatan unik dalam mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina, dengan fokus khusus pada isu-isu terkait hak asasi manusia, hukum internasional, dan resolusi. APAN membangun

jaringan luas melalui kerja sama dengan berbagai organisasi hak asasi manusia, kelompok keagamaan, dan komunitas diaspora Palestina, serta melibatkan masyarakat dalam kampanye dan pendidikan publik. APAN menawarkan wadah bagi semua warga Australia yang beritikad baik yang ingin menyuarakan penentangan terhadap penjajahan yang sedang berlangsung di Palestina, serta pendudukan militer ilegal dan brutal yang telah diderita oleh warga Palestina selama beberapa dekade (Australia Palestine Advocacy Network, n.d.).

APAN memiliki *policy network*, dengan aktif berinteraksi bersama legislator untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia dan menggunakan media sosial untuk memperluas dampak advokasi mereka. APAN juga berfokus pada pendidikan dan kesadaran publik melalui kampanye, seminar, dan publikasi untuk meningkatkan pemahaman tentang situasi Palestina. APAN membangun koalisi dengan organisasi serupa, memobilisasi masyarakat untuk mendukung isu Palestina, dan berpartisipasi dalam proses legislasi untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia. Dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi, serta berfokus pada prinsip hak asasi manusia, APAN bertujuan menciptakan dampak signifikan dalam mempromosikan keadilan bagi Palestina, baik di Australia maupun secara internasional (Australia Palestine Advocacy Network, n.d.).

Salah satu strategi APAN dengan memperkuat kemampuan advokasi generasi muda Palestina di Australia untuk beraksi dalam mendukung isu Palestina, memperluas jangkauan media mereka untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas media dalam melaporkan perspektif Palestina, serta meningkatkan keterlibatan di media sosial untuk mencapai audiens baru. Kemudian turut menyuarakan *campaign* BDS terhadap Israel,

melalui kolaborasi dengan berbagai pihak asing seperti kelompok advokasi, media, pemerintah, dan organisasi internasional. Kampanye yang dilakukan APAN dapat melalui lobi pemerintah, gerakan sosial, serta media. Strategi kampanye media APAN melalui halaman web, artikel majalah, kolom opini, video, dan unggahan media sosial yang diproduksi oleh APAN. Strategi tersebut berupaya mempengaruhi kebijakan publik Australia terhadap Palestina dan Israel, serta memobilisasi dukungan publik Australia maupun global untuk memahami dan mengkritisi isu genosida Israel terhadap Palestina yang diadvokasi oleh APAN (Lim 2022).

APAN menggunakan model jaringan yang memfasilitasi kolaborasi antar organisasi anggotanya. Kepemimpinan APAN terdiri dari komite eksekutif yang dipilih dari perwakilan anggota, memastikan keberagaman dalam representasi dan kontribusi ide. Komite Eksekutif APAN terdiri dari pemimpin-pemimpin yang mewakili berbagai organisasi anggota, dengan pendekatan kolektif dalam pengambilan keputusan dan advokasi. APAN terus memainkan peran utama dalam memperjuangkan hak-hak Palestina di Australia, menggerakkan dukungan publik, dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang dihadapi oleh rakyat Palestina (Australia Palestine Advocacy Network, n.d.).

APAN dapat dikategorikan sebagai *associative pressure groups*, karena pendekatan advokasi terstruktur, didukung oleh anggota yang beragam dan upaya strategis untuk mempengaruhi kebijakan publik. APAN terorganisasi secara formal untuk memperjuangkan kepentingan tertentu, yakni hak-hak Palestina. APAN berfungsi sebagai agen perubahan yang lebih dari sekadar meningkatkan kesadaran, tetapi berfokus pada perubahan kebijakan yang konkret. Sebagai badan yang terdaftar,

APAN memiliki struktur yang jelas dan terorganisir, termasuk anggota dari berbagai organisasi dengan tujuan bersama. Melalui kegiatan seperti lobi legislatif, kampanye publik, dan penyampaian informasi, APAN berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah Australia terkait Palestina, sejalan dengan fungsi utama kelompok tekanan asosiasional dalam memperjuangkan kepentingan tertentu dan mempengaruhi keputusan politik (Biswas 2020).

### **3.2. Aktivitas gerakan APAN dalam mengadvokasi isu Israel-Palestina**

APAN bergerak sebagai *pressure group* yang terorganisir dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Australia terkait Palestina. APAN mengorganisir kepentingan bersama sekelompok individu dan organisasi untuk menekan pemerintah agar lebih mendukung hak-hak Palestina, mempengaruhi kebijakan luar negeri, dan mendorong perubahan sistemik dalam pengambilan keputusan pemerintah Australia. Sebagaimana kelompok tekanan pada umumnya, APAN berfokus pada perubahan kebijakan tanpa berusaha merebut kekuasaan politik, tetapi melalui pengaruh yang kuat pada kebijakan negara. Dalam masyarakat modern, kelompok-kelompok dengan kepentingan khusus memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan negara (Biswas 2020).

Strategi *pressure group* menurut Halpin dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu strategi *insider* dan *outsider*. Strategi insider melibatkan pendekatan yang lebih formal dan langsung dalam berinteraksi dengan pembuat kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, biasanya menyediakan argumen yang terperinci dan berbasis riset untuk mendukung posisi mereka (Halpin 2012, 181). APAN turut menggunakan

strategi *insider* dengan mengirimkan surat terbuka atau petisi kepada pejabat pemerintah untuk mengekspresikan keprihatinan dan mendesak tindakan tertentu, APAN juga menyediakan informasi, data, dan analisis yang mendukung posisi mereka, membantu pemerintah sebagai pembuat kebijakan memahami isu-isu yang kompleks. Pada 7 Desember 2023 lalu, Nasser Mashni menerbitkan surat terbuka pada laman resmi APAN yang ditujukan kepada *representative* Australia yang saat ini dan sebelumnya terpilih dan meminta mereka untuk menandatangani pernyataan dan menegaskan dukungan untuk gencatan senjata segera dan perdamaian yang adil dan abadi mengungkapkan keprihatinan mendalam atas situasi mengerikan di Gaza, dan meminta pemerintah Australia untuk mengambil langkah luar biasa demi melindungi rakyat Palestina. Mashni mendesak para wakil untuk mengesampingkan politik partai dan berfokus pada kemanusiaan, dengan harapan mereka dapat membantu mencapai solusi politik yang adil dan berkelanjutan. Hingga saat ini petisi tersebut telah mendapat sebanyak 329 *signatories* (Australia Palestine Advocacy Network 2023).

*Parliamentary trips* juga menjadi bagian dari strategi insider yang dilakukan oleh APAN. Penyelenggaraan perjalanan ke Israel dan Palestina oleh APAN bertujuan untuk memberikan keseimbangan pengalaman bagi anggota parlemen federal. Dalam perjalanan ini, anggota parlemen setidaknya menanggung sebagian biaya perjalanan mereka sendiri. Pada periode Juni 2018–April 2022, anggota parlemen federal Australia lebih banyak menerima perjalanan yang disponsori ke Israel dibandingkan ke negara lain. Perjalanan ini disponsori oleh pihak non-pemerintah Australia, seperti AIJAC dan *International Institute For Strategic Leadership Dialogue* (Clarence, 2018). Selama kunjungan mereka ke Israel, anggota delegasi menandatangani deklarasi

dukungan untuk Israel dan mengutuk gambaran anti-Semit yang menggambarkan Israel sebagai "penjajah," sekaligus merayakan ulang tahun ke-100 Deklarasi Balfour (Australia Palestine Advocacy Network 2022).

APAN memimpin dua perjalanan untuk anggota parlemen federal pada tahun 2017, sementara tur yang direncanakan pada tahun 2020 terpaksa dibatalkan karena pandemi COVID-19. Ada enam politisi federal (Koalisi-2; ALP-3; *Crossbench*-1) yang mengunjungi Palestina pada periode yang sama dengan perjalanan parlemen ke Israel. Tujuan kunjungan mereka adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konflik Palestina-Israel dan melihat langsung dampak pendudukan Tepi Barat terhadap kehidupan sehari-hari warganya, sambil mendengarkan langsung dari warga Palestina dan Israel setempat (Australia Palestine Advocacy Network 2022).

Strategi *outsider* dalam konteks pressure group lebih mengandalkan opini publik dan aksi langsung untuk mempengaruhi kebijakan, strategi ini dikenal dengan aksi-aksi yang menarik perhatian guna mengubah agenda kebijakan dan mendorong pemerintah untuk bertindak. Sebagai kelompok tekanan, APAN memilih strategi ini karena tujuan mereka sering kali dianggap terlalu ekstrem untuk diterima oleh pemerintah. Siklus pemilihan umum di Australia relatif singkat, sehingga anggota parlemen sangat memperhatikan reputasi dan citra publik mereka. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan bahwa ketidakaktifan mereka dalam menangani masalah ini akan berdampak pada reputasi dan peluang mereka dalam pemilu mendatang. Dukungan suara dari berbagai konstituen dapat mendorong politisi untuk bertindak, memanfaatkan pengaruh politik yang dimiliki sebagai pemilih untuk mendesak

perubahan kebijakan pemerintah Australia terhadap konflik Israel-Palestina, khususnya dalam kebijakan luar negeri dan hubungan diplomatik dengan Israel (Halpin 2012, 181).

Kedua strategi tersebut mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik sesuai dengan tujuan masing-masing kelompok. APAN, dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesadaran publik dan mempengaruhi kebijakan lebih condong kepada kategori strategi *outsider*, berfokus pada mobilisasi publik dan advokasi langsung sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Beberapa contoh strategi *outsider* yang digunakan APAN untuk mencapai tujuannya, diantaranya:

### **3.2.1 Lobby**

Lobi menjadi bagian dari strategi *Pressure Groups*, lobi adalah cara resmi yang digunakan oleh APAN untuk berkomunikasi, mempengaruhi atau mendorong anggota parlemen atau pejabat pemerintah lainnya untuk mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan kepentingan APAN, terlepas dari sikap awal pejabat tersebut yang mungkin memiliki pandangan berbeda sebelumnya. Tujuan utama lobi lebih sekedar mengubah opini publik, melainkan untuk secara langsung mempengaruhi keputusan-kebijakan yang diambil oleh para pengambil kebijakan (Next Ias 2024). Upaya pengiriman surat terbuka atau petisi kepada pemerintah dianggap belum cukup untuk menciptakan perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu, APAN memerlukan massa yang lebih luas dan kritis agar pemerintah dapat memperhatikan seruan ini.

APAN menerbitkan "*MP Engagement Toolkit: A Practical Guide for Demanding an End to Israel's Genocide in Gaza*", yang bertujuan membantu warga

Australia, baik individu maupun kelompok, dalam mendorong anggota parlemen Australia agar lebih tegas dalam menanggapi genosida di Gaza. *Toolkit* ini memberikan panduan praktis bagi para pendukung, sekutu, dan anggota komunitas untuk melobi anggota parlemen secara strategis dan efektif. Dengan memanfaatkan pengaruh politik yang dimiliki sebagai pemilih, panduan ini menawarkan langkah-langkah konkret untuk mendesak perubahan kebijakan pemerintah Australia terhadap konflik Israel-Palestina, khususnya dalam kebijakan luar negeri dan hubungan diplomatik dengan Israel (Australia Palestine Advocacy Network 2024).

APAN mempertimbangkan faktor yang paling menarik bagi para politisi, yaitu kemungkinan terpilih kembali dalam pemilu. Siklus pemilihan umum di Australia singkat, dan anggota parlemen sangat memperhatikan reputasi serta citra publik mereka, sehingga, dukungan suara dari berbagai konstituen dapat mendorong politisi untuk bertindak. Untuk itu, penting untuk menunjukkan bahwa ketidakaktifan mereka dalam masalah ini akan mempengaruhi reputasi dan peluang mereka dalam pemilu mendatang. *MP Engagement toolkit* sebagai panduan bagi warga Australia yang peduli pada isu kemanusiaan di Palestina dengan menyampaikan seruan tersebut kepada anggota parlemen. Ada banyak cara untuk menyampaikan pesan ini, mulai dari menandatangani kartu pos, mengirim email, hingga mengadakan pertemuan formal dengan anggota parlemen. Setiap usaha yang dilakukan akan memperkuat pesan bahwa jika mereka tidak bertindak terkait Gaza, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun desakan untuk enam langkah kebijakan penting dari *MP Engagement toolkit* yang diprakarsai APAN, yaitu dengan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Israel yang terlibat dalam genosida dan pendudukan Palestina, menghentikan seluruh dukungan

ekonomi, diplomatik, dan militer untuk Israel, memutuskan pasokan senjata, mencabut status DGR untuk organisasi amal yang mendukung pemukiman ilegal Israel, mendukung penyelidikan kejahatan perang Israel, serta mengakui hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan hukum internasional (Australia Palestine Advocacy Network 2024).

APAN menuntut agar para pemimpin Australia mengakui perjuangan Palestina dan urgensi untuk mengakhiri kekerasan kolonial di wilayah tersebut. APAN mengecam ketidakpedulian pemerintah Australia yang terpilih tidak mengakui genosida di Gaza dan penderitaan Palestina pada peringatan 7 Oktober 2023. Ketidakpedulian ini mencerminkan kecenderungan untuk mengutamakan kehidupan Israel daripada keadilan dan masa depan Palestina, serta mengabaikan kenyataan 76 tahun pendudukan kolonial Israel yang ilegal. Selain itu, serangan politik baik dari pemerintah, oposisi, maupun media mainstream terhadap mereka yang mendukung Palestina menunjukkan pengabaian terhadap rasa duka komunitas Palestina dan meremehkan agar seruan Australia untuk mengambil langkah konkret untuk mengakhiri genosida dan meminta pertanggungjawaban Israel (Australia Palestine Advocacy Network 2024).

Menurut APAN, kegagalan internasional untuk menghentikan genosida Israel disebabkan oleh impunitas yang diberikan kepada Israel, termasuk oleh negara-negara Barat seperti Australia. Nasser Mashni, Presiden APAN, menegaskan bahwa pemimpin terpilih tidak bisa mengklaim inklusivitas jika kebijakan mereka meremehkan pengalaman dan kehidupan Palestina. Ia menekankan bahwa meminta pemerintah Australia bertindak sesuai dengan kewajiban hukum internasional adalah langkah yang

sah dan bukan provokatif. Komunitas yang memperjuangkan pembebasan Palestina layak mendapatkan solidaritas, bukan permusuhan (Australia Palestine Advocacy Network 2024).

APAN mengkritik penunjukan utusan khusus untuk Islamofobia oleh Pemerintah Australia karena dianggap memperkuat narasi rasisme yang selektif dan mengabaikan diskriminasi sistemik, terutama terhadap masyarakat Palestina, orang asli, dan kelompok terpinggirkan lainnya. APAN menilai penunjukan ini hanya fokus pada satu bentuk rasisme, sementara rasisme terhadap kelompok-kelompok terpinggirkan tersebut lebih berakar pada kolonialisme, bukan agama. APAN meminta pemerintah untuk membubarkan peran utusan khusus ini dan lebih fokus pada upaya anti-rasisme yang berbasis bukti dan inklusif. Presiden APAN, Nasser Mashni, menegaskan bahwa genosida terhadap Palestina adalah bentuk rasisme yang paling ekstrem, yang didorong oleh kolonialisme, dan bahwa diskriminasi terhadap Palestina bukanlah soal agama, tetapi penindasan terhadap masyarakat adat yang tanahnya telah dicuri. APAN mengingatkan pemerintah untuk berkomitmen pada penciptaan dunia tanpa rasisme, dengan mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan dan menciptakan kebijakan yang mendorong kesetaraan dan keadilan (Australia Palestine Advocacy Network 2024).

Kemudian pada September 2024 lalu, APAN mengajukan serangkaian rekomendasi kepada komite Senat yang menyelidiki rezim sanksi Australia, terkait dengan penolakan Australia untuk menerapkan sanksi tegas terhadap Israel atas genosida di Gaza serta pendudukan dan apartheid ilegal di Tepi Barat. Meskipun mendapat kecaman internasional dan ICJ, respons Australia terhadap pelanggaran

hukum internasional oleh Israel dianggap kurang memadai dan tidak konsisten. APAN merekomendasikan agar sanksi diperluas untuk mencakup pelanggaran hak penentuan nasib sendiri, genosida, dan apartheid, serta untuk menargetkan pejabat pemerintah Israel, pemimpin militer, dan entitas yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakinginan Australia untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel, sementara negara ini menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, Myanmar, dan Iran, menunjukkan adanya standar ganda yang merusak komitmennya terhadap hak asasi manusia. APAN juga menekankan pentingnya adanya kerangka kerja sanksi yang transparan dan bebas dari pertimbangan politik, serta lebih melibatkan masyarakat sipil (Australia Palestine Advocacy Network 2024).

APAN juga turut mendukung mahasiswa dan staf di *University of Melbourne* (UoM) dan *Western Sydney University* (WSU) yang menuntut penghentian hubungan dengan lembaga-lembaga Israel, seperti *the Hebrew University in Jerusalem* (HUJI) dan produsen senjata. APAN mengecam tindakan universitas yang melibatkan intimidasi polisi, penangkapan mahasiswa, dan tuduhan antisemitisme terhadap protes mahasiswa. Menurut APAN, upaya mendiskreditkan protes sebagai "anti semit" memperburuk dampak negatif dari definisi IHRA tentang antisemitisme yang digunakan untuk menghalangi kritik terhadap Israel. APAN menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa tersebut selaras dengan pandangan hukum internasional yang menyatakan pendudukan Israel atas Palestina ilegal, serta mengkritik peran universitas Israel dalam mendukung kolonialisme dan pelanggaran hak asasi manusia di Palestina (Australia Palestine Advocacy Network 2024).

### 3.2.2 Election

Dalam kategori pemilihan (*election*), *pressure groups* berperan dalam sistem politik dengan memungkinkan bentuk partisipasi baru dari masyarakat dalam proses legislatif dan administrasi. Kelompok ini tidak hanya melibatkan masyarakat pada saat pemilu, tetapi juga berusaha menjaga minat berkelanjutan terhadap pemerintahan antara periode pemilu. *Pressure groups* biasanya dapat mempengaruhi hasil pemilu dengan mendukung calon yang dianggap mendukung kepentingan mereka dan mendorong calon tersebut untuk terpilih sebagai pejabat publik. Sebagai contoh, teknik pertama yang digunakan adalah pemilihan kandidat, di mana *pressure groups* mendukung calon yang pro terhadap kepentingan mereka agar dapat menduduki posisi publik yang strategis.

Dalam hal ini adapun kebijakan yang dilakukan APAN sebagai *pressure group* yaitu memberikan dukungan untuk kandidat pro-Palestina yang mana memiliki pandangan yang sejalan dengan tujuan APAN, termasuk dalam bentuk kampanye, atau penyebaran informasi. APAN berusaha untuk meningkatkan kesadaran pemilih tentang posisi kandidat terkait isu Palestina, mendorong pemilih untuk memilih kandidat yang mendukung hak-hak Palestina. Kemudian juga APAN sering mengadakan acara atau forum untuk mendiskusikan isu-isu Palestina, serta memberikan platform bagi dialog dan pertukaran ide.

Pada pemilu 2022, *muslim voters* dan masyarakat Australia yang peduli dengan isu Palestina berusaha menggulingkan pemerintahan Scott Morrison dan partai konservatif (Liberal) yang dipimpinnya dengan tidak memilih partai tersebut pada pemilu. Mereka berharap Anthony Albanese terpilih sebagai Perdana Menteri untuk

menggantikan pemerintah tersebut. Nasser Mashni, Presiden APAN, menyatakan bahwa sejarah akan mencatat mereka yang memperjuangkan hak dan kehidupan rakyat Palestina dalam masa sulit, serta mereka yang meremehkan penderitaan Palestina dan menciptakan perpecahan dalam masyarakat kita (McCabe and Australia Palestine Advocacy Network 2022).

Pada akhir Maret 2022, jajak pendapat yang diselenggarakan oleh APAN dan AFOPA menunjukkan bahwa pandangan publik Australia mengenai Palestina sangat berbeda dengan sikap pemerintah. Hasil jajak pendapat tersebut mengkritik kebijakan pemerintah Morrison terhadap wilayah Palestina yang diduduki, terutama terkait pemukiman ilegal, apartheid, pengakuan Palestina, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Morrison sendiri menyatakan tetap menjadi teman setia Israel, meskipun banyak kekhawatiran terhadap tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat (Australia Palestine Advocacy Network 2022).

Menjelang pemilu, APAN menerbitkan "*Major Parties Scorecard on Palestine*", Koalisi Liberal mendapat nilai sedikit kurang dari satu bintang, ALP sedikit lebih dari tiga bintang, dan *The Greens* hampir lima bintang. Endorsement APAN terhadap pemilu di Australia bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan calon legislatif mengenai isu Palestina melalui kampanye dan pemeringkatan partai, APAN memberikan informasi yang dapat membantu pemilih membuat keputusan yang mendukung kebijakan luar negeri yang lebih adil terhadap Palestina (Australia Palestine Advocacy Network 2022).

Survei yang diprakarsai oleh APAN tersebut menunjukkan bahwa Partai Buruh lebih mendekati posisi publik dibandingkan Koalisi Liberal, yang mendapat skor buruk

terkait isu Palestina. Pembaca diminta untuk mempertimbangkan hasil ini saat memilih, namun pengamat mencatat bahwa lobi Israel cukup sukses untuk menjaga isu ini tetap jauh dari perhatian publik. Namun, beberapa calon yang merupakan pendukung Israel paling menonjol di Parlemen, Josh Frydenberg dan Dave Sharma, kalah dalam pemilu, sementara kandidat yang didukung oleh *Climate 200* dan memiliki pandangan lebih kritis terhadap Israel berhasil menang. Dalam artikelnya, Paul Heywood-Smith menyerukan agar Partai Buruh, yang kini menjadi pemerintah, harus memperhatikan suara publik yang menginginkan tindakan nyata terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Palestina, termasuk sanksi dan dukungan terhadap penuntutan Israel di ICC. Ia tidak mengklaim bahwa isu Palestina menentukan hasil pemilu, tetapi ia menyarankan bahwa hal tersebut bisa saja berperan (Smith 2022).

Publik Australia tidak akan mentolerir ketidakpedulian terhadap peristiwa-peristiwa penting, seperti pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh. Mereka juga tidak akan menerima sikap Menteri Luar Negeri yang baru, Penny Wong, yang terus mengulang pernyataan standar mengenai dukungan Australia terhadap solusi dua negara yang dinegosiasikan oleh kedua pihak. Sementara itu, pemerintah Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah mengakui negara Palestina. Oleh karena itu, tidak perlu lagi berbicara tentang negosiasi, dan seharusnya pemerintah Australia bertindak sesuai dengan resolusi yang telah disetujui dalam Konferensi Partai Buruh terbaru, yang menyarankan agar pemerintah Buruh yang akan datang mengakui negara Palestina dengan batasan wilayah sebelum 1967 (Smith 2022).

### **3.2.3 Propaganda**

*Pressure Groups* juga menggunakan propaganda sebagai teknik untuk mempengaruhi opini publik dan secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, di mana pemerintah sangat dipengaruhi oleh sentimen publik, propaganda menjadi alat penting untuk membentuk pandangan masyarakat ke arah yang mendukung kepentingan kelompok. Propaganda dapat diartikan sebagai manipulasi simbol atau pesan yang bertujuan untuk mengarahkan opini publik pada sudut pandang tertentu, sehingga kelompok tekanan dapat mempengaruhi keputusan pemerintah tanpa harus terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan (Next Ias 2024).

Propaganda yang digunakan oleh APAN ialah seperti kampanye media sosial, APAN memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi, membagikan cerita, dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu Palestina. APAN menerbitkan artikel, laporan, dan materi edukasi lainnya untuk memberikan informasi yang akurat dan mendalam tentang situasi di Palestina. APAN turut mengorganisir demonstrasi, aksi protes, dan kegiatan publik lainnya untuk menarik perhatian media dan masyarakat terhadap isu-isu yang mereka angkat. Melalui strategi BDS, APAN berusaha untuk menciptakan tekanan sosial dan politik terhadap Israel, dengan harapan dapat mendorong perubahan yang positif bagi rakyat Palestina. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada tindakan individu, tetapi juga berusaha untuk membangun kesadaran kolektif dan dukungan luas di masyarakat Australia untuk isu-isu yang dihadapi oleh Palestina.

Gerakan BDS muncul sebagai respons terhadap kegagalan Kesepakatan Oslo (1993). Pada tahun 2005, lebih dari 170 organisasi Palestina mengimbau komunitas internasional untuk menggunakan tekanan ekonomi agar Israel mematuhi kewajiban internasionalnya. APAN mendukung dan mengadvokasi kebijakan BDS terhadap institusi Israel dan internasional yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional di Israel dan Palestina. APAN mengakui BDS sebagai sarana *non-violence* untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia, serta hukum internasional, dan menentang segala bentuk rasisme, termasuk anti-semitisme dan Islamofobia. APAN mendukung BDS sebagai cara *non-violence* untuk mengakhiri Pendudukan dan mencapai perdamaian yang adil di Israel-Palestina. APAN juga memahami bahwa sasaran BDS harus dipilih dengan hati-hati untuk mendukung kerja organisasi perdamaian Palestina dan Israel (Australia Palestine Advocacy Network 2015).

APAN juga menggunakan UNRWA sebagai saluran untuk mendukung hak-hak Palestina melalui propaganda yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan dukungan internasional. Dengan meningkatkan kesadaran publik, APAN menggunakan informasi dari UNRWA untuk mengedukasi masyarakat mengenai kondisi pengungsi Palestina dan peran vital UNRWA dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. APAN juga mengutip laporan dan pernyataan UNRWA untuk menyoroti kebutuhan mendesak akan dukungan internasional, terutama ketika pendanaan UNRWA terancam dihentikan, yang berisiko menambah penderitaan pengungsi Palestina. Ketika UNRWA menghadapi kritik, APAN menggunakan kesempatan tersebut untuk mengadvokasi perlunya penyelidikan

yang adil, dan menegaskan bahwa tindakan individu tertentu tidak boleh mencoreng reputasi lembaga yang telah banyak berkontribusi dalam membantu pengungsi (Australia Palestine Advocacy Network 2024).

APAN menyambut baik keputusan Pemerintah Australia untuk mengembalikan dana yang dibekukan untuk UNRWA dan mendukung bantuan kemanusiaan internasional. Namun, APAN menilai keputusan ini terlambat karena UNRWA terancam runtuh dan warga Palestina di Gaza menghadapi ancaman kelaparan. APAN mengingatkan bahwa, meski bantuan udara penting, Australia perlu menekan Israel untuk menghentikan serangan militernya, membuka perbatasan Gaza, dan memastikan akses bantuan yang aman. APAN juga menuntut agar Australia mendesak penghentian tembakan, menghentikan serangan terhadap konvoi bantuan, dan memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan (Australia Palestine Advocacy Network 2024). Pendekatan yang beragam ini memungkinkan APAN untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memperkuat posisi mereka sebagai kelompok tekanan yang efektif di Australia.

Dalam menghadapi kritik yang meningkat, Menteri Luar Negeri Penny Wong mulai menggunakan bahasa yang lebih tegas, mendesak Israel untuk mematuhi hukum internasional dan aturan perang. Dapat dilihat secara historis, Australia cenderung abstain atau mendukung posisi AS dan Israel dalam resolusi terkait konflik Israel-Palestina. Namun, pemungutan suara terbaru pada November 2024 yang mendukung pengakuan atas kedaulatan Palestina menunjukkan perubahan signifikan dari pola kebijakan tersebut. Ini adalah pertama kalinya pemerintah Australia memberikan suara mendukung resolusi “kedaulatan permanen” sejak diperkenalkan dalam beberapa

bentuk dua dekade sebelumnya. Komunitas Yahudi Australia Mengungkapkan kekhawatiran atas pergeseran ini, yang dianggap sebagai penyimpangan dari dukungan tradisional Australia terhadap Israel. Sementara itu, kelompok pro-Palestina menyambut baik keputusan ini sebagai pengakuan yang sudah lama tertunda terhadap hak-hak Palestina dan upaya untuk menuntut akuntabilitas dari tindakan Israel (Canales 2024).

APAN menyambut positif keputusan Australia yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengakui kedaulatan Palestina atas sumber daya alam di wilayah yang diduduki. APAN menekankan pentingnya penerapan Konvensi Jenewa Untuk melindungi warga sipil dalam masa perang. Keputusan ini menandai perubahan signifikan, karena selama 13 tahun terakhir, Australia cenderung abstain dari pemungutan suara serupa. Resolusi tersebut bertujuan untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pendudukan ilegal Israel, yang telah merusak sumber daya alam Palestina dan mengancam ekonomi serta lingkungan masyarakat Palestina. Dengan mendukung resolusi ini, Australia mengambil sikap yang berarti terhadap perampasan sistemik yang dialami oleh warga Palestina selama bertahun-tahun di bawah pendudukan Israel. Resolusi ini juga menegaskan hak Palestina untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh pendudukan ilegal. APAN mendesak pemerintah Australia untuk memperkuat posisi ini dengan tindakan konkret untuk mengakhiri genosida di Gaza dan apartheid di Palestina. Langkah-langkah yang diusulkan termasuk sanksi, embargo senjata, penangguhan perdagangan, serta dukungan lebih lanjut untuk tindakan hukum internasional yang dapat meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakannya (Australia Palestine Advocacy Network 2024).

Pergeseran kebijakan tersebut memiliki implikasi diplomatik, terutama terhadap hubungan Australia dengan Amerika Serikat, karena menandakan sikap yang lebih kritis terhadap Israel. Pemerintahan Albanese menunjukkan adanya potensi untuk mengevaluasi ulang peran Australia dalam konflik ini, dengan pendekatan yang lebih seimbang dan adil di tingkat internasional. Secara keseluruhan, pemungutan suara tersebut mencerminkan evolusi kebijakan luar negeri Australia yang lebih terbuka untuk terlibat secara kritis dalam isu-isu global, khususnya dalam hal konflik Israel-Palestina (Canales 2024).

Nasser Mashni, Presiden Jaringan Advokasi Palestina Australia, menyambut perubahan kebijakan Australia yang mendukung pengakuan kedaulatan Palestina sebagai "pengakuan yang sudah lama tertunda". Menurutnya, dukungan Australia ini mengakui dampak buruk dari perampasan dan penghancuran sumber daya Palestina oleh Israel, serta mengirimkan pesan kuat bahwa dunia menuntut pertanggungjawaban atas ketidakadilan tersebut. Mashni juga menyatakan bahwa pemungutan suara ini harus menjadi titik balik bagi pemerintah Australia untuk mengakui dan bertindak sesuai dengan kewajiban hukumnya, menggunakan semua alat ekonomi, politik, dan diplomatik yang dimiliki untuk mengakhiri genosida, pendudukan ilegal, dan apartheid yang dilakukan Israel terhadap Palestina (Canales 2024).

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Serangan Israel terhadap Palestina terus berlanjut, dengan puncaknya pada 7 Oktober 2023 yang dapat dianggap sebagai kejahatan genosida. Kondisi tersebut telah mengundang simpati masyarakat global, mulai dari individu, entitas politik, dan media. Salah satunya adalah APAN, sebagai koalisi nasional yang memanfaatkan semangat warga Australia untuk hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan Palestina. APAN berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat Australia dan mendorong dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Hal ini tercermin dalam perubahan kebijakan luar negeri Australia, seperti pembatalan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan dukungan terhadap resolusi PBB yang mengakui kedaulatan Palestina. Peralihan kekuasaan di Australia dari Partai Liberal ke Partai Buruh Australia mencerminkan dinamika dalam sistem pemerintahan yang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan publik. Dalam konteks ini, Partai Liberal yang sebelumnya berkuasa memiliki pendekatan konservatif terhadap kebijakan luar negeri dan domestik, termasuk sikap yang lebih mendukung Israel dalam konflik Israel-Palestina. Sebaliknya, Partai Buruh, yang dipimpin oleh Anthony Albanese, berkomitmen untuk mengambil pendekatan yang lebih moderat, dengan fokus pada *two-state solution* dan mengedepankan dialog internasional yang lebih luas.

Perubahan kebijakan luar negeri Australia ini tidak terlepas dari dinamika internal di Partai Buruh, di mana meskipun ada ketegangan antara anggota yang pro-Palestina dan yang pro-Israel, pemerintahan Albanese menunjukkan komitmen untuk mengambil langkah-langkah positif. Dukungan yang meningkat dari masyarakat

Australia terhadap pengakuan negara Palestina menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan kebijakan ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan luar negeri Australia sebelumnya, yang cenderung mendukung Israel, telah memberikan ruang bagi APAN untuk beroperasi dan mempengaruhi keputusan pemerintah.

*Pressure Groups* menjadi salah satu cara untuk membentuk sentimen publik, dan kini telah menjadi bagian yang diperlukan dari mesin demokrasi. APAN berperan sebagai jembatan antara masyarakat sipil dan pembuat kebijakan, berusaha untuk memastikan bahwa suara rakyat Palestina didengar dalam arena politik Australia. APAN bertindak sebagai penghubung antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, dalam upaya mempromosikan perubahan sosial dan politik. Termasuk mengawal akuntabilitas dengan membongkar pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Upaya yang dilakukan oleh APAN dapat dikatakan terimplementasi dengan baik untuk ketiga strategi yaitu *election*, *lobbying*, dan *propagandizing*. Dimana APAN mampu menekan atau berperan sebagai *pressure group* bagi pemerintah melalui kolaborasi dan integrasi antar kelompok masyarakat. APAN mampu mendistribusikan aspirasinya melalui peran dari media, masyarakat global, hingga organisasi internasional.

APAN mengorganisir kampanye dan menyampaikan petisi dan surat kepada pejabat pemerintah dalam kategori strategi lobi nya, meminta mereka untuk mengambil tindakan yang mendukung hak-hak Palestina. APAN terlibat dalam forum publik dan diskusi untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu Palestina dan membangun

dukungan di kalangan pembuat kebijakan. Dalam strategi *election*, turut melibatkan pengaruh terhadap proses pemilihan umum untuk memastikan bahwa kandidat yang mendukung agenda mereka terpilih. Dengan kampanye kesadaran pemilih, APAN mengedukasi pemilih tentang posisi kandidat terkait isu Palestina, sehingga pemilih dapat membuat keputusan tepat saat memilih. Hingga saat ini, propaganda terlihat sebagai strategi utama APAN, dengan penyebaran informasi, ide, atau rumor untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk persepsi.

Dengan berkampanye di *platform* media sosial, APAN menyebarkan informasi tentang kondisi di Palestina, mengedukasi masyarakat, dan membangun dukungan untuk isu-isu yang diperjuangkan. APAN memproduksi dan mendistribusikan materi edukasi, seperti brosur, artikel, dan laporan, yang menjelaskan situasi di Palestina dan mengapa dukungan internasional sangat penting. APAN turut menyelenggarakan acara publik, seminar, dan diskusi untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan dialog tentang isu-isu Palestina, serta untuk menggalang dukungan dari masyarakat luas. Melalui strategi tersebut, APAN berperan sebagai *pressure group* yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu Palestina di Australia. Dengan pendekatan yang terorganisir dan terfokus, APAN berupaya untuk menciptakan perubahan positif dalam pandangan dan kebijakan pemerintah Australia terhadap Palestina.

Penelitian ini juga mencatat bahwa APAN tidak hanya berfokus pada isu Palestina, tetapi juga menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander di Australia. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dalam advokasi hak asasi manusia, di mana APAN berusaha

menghubungkan perjuangan rakyat Palestina dengan isu-isu keadilan sosial lainnya di Australia. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam batas tertentu, APAN telah berhasil menciptakan dampak signifikan dalam kebijakan luar negeri Australia terkait konflik Palestina-Israel. Dengan melanjutkan upaya advokasi dan meningkatkan kesadaran publik, APAN diharapkan dapat mendorong pemerintah Australia untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Palestina dan mendukung pengakuan penuh terhadap negara Palestina.

Meskipun APAN telah mencapai beberapa kemajuan, masih terdapat tantangan yang dihadapi. Kelompok pro-Israel yang kuat di Australia sering berusaha mendiskreditkan upaya APAN dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun, dukungan yang meningkat dari masyarakat serta beberapa politisi yang mendukung hak-hak Palestina memberikan harapan bagi APAN untuk terus mempengaruhi kebijakan pemerintah di masa depan.

#### **4.2. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, tentunya masih memiliki keterbatasan, adanya saran dan rekomendasi diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya untuk memperkaya terkait kajian tema serupa. Maka dari itu, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup analisis lebih lanjut tentang dampak kebijakan luar negeri Australia terhadap masyarakat Palestina dan bagaimana kelompok-kelompok advokasi lainnya dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks yang lebih luas, penting untuk mempertimbangkan peran negara-negara lain dalam konflik ini dan

bagaimana solidaritas internasional dapat diperkuat untuk mendukung keadilan bagi Palestina. Dengan memahami dinamika yang ada, diharapkan akan ada langkah-langkah yang lebih konkret dan efektif dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, Howard. 1992. "Australia and the Birth of Israel: Midwife or Abortionist." *YorkSpace*. Accessed on 14 July 2024 from <https://yorkspace.library.yorku.ca/server/api/core/bitstreams/f5276355-506e-4797-83a0-e52ed0d83ea0/content>.
- Al-Haq Defending Human Rights. 2021. "Sheikh Jarrah and Silwan: Ongoing Nakba and Israeli Dispossession of Palestinians."
- Alkhshali, Hamdi. 2018. "Australia Recognizes West Jerusalem as Capital of Israel." CNN. 2018. Accessed on 01 September 2024 from <https://edition.cnn.com/2018/12/15/australia/israel-capital-west-jerusalem-australia-intl/index.html>.
- Anadolu. 2024. "Thousands March across Australia Ahead of 1st Anniversary of Gaza Genocide."
- Australia Center for International Justice. 2021. "Joint Letter: Sheikh Jarrah Families Urge ICC Prosecutor to Investigate Forced Evictions in East Jerusalem." *Australia Center for International Justice*, April.
- Australian Labor Party. 2021. "ALP National Platform." *Australian Labor Party*, 2021. Accessed on 10 July 2024 from <https://alp.org.au/media/2594/2021-alp-national-platform-final-endorsed-platform.pdf>.
- Australia Palestine Advocacy Network. 2022. "Major Parties Scorecard on Palestine." Australia Palestine Advocacy Network. 2022. Accessed on 23 October 2024 from <https://apan.org.au/vote-palestine/>.

Australia Palestine Advocacy Network. 2022. “Non-Australian Government Funded Parliamentary Travel June 2018 - April 2022.” Australia Palestine Advocacy Network. 2022.

Australia Palestine Advocacy Network. 2023. “An Open Letter to Australian Elected Representatives.”

Australia Palestine Advocacy Network. 2024. “APAN Backs University Students’ Demands to Cut Ties with Israeli Universities, Weapons Companies.” Australia Palestine Advocacy Network. 2024. Accessed on 10 September 2024 from [https://apan.org.au/media\\_release/apan-backs-university-students-demands-to-cut-ties-with-israeli-universities-weapons-companies/](https://apan.org.au/media_release/apan-backs-university-students-demands-to-cut-ties-with-israeli-universities-weapons-companies/).

Australia Palestine Advocacy Network. 2024. “APAN Demands Stronger Sanctions Regime, End to Australia’s Double Standards on Israel.” Australia Palestine Advocacy Network. 2024. Accessed on 10 September 2024 from [https://apan.org.au/media\\_release/apan-demands-stronger-sanctions-regime/](https://apan.org.au/media_release/apan-demands-stronger-sanctions-regime/).

Australia Palestine Advocacy Network. 2024. “APAN Welcomes Long Overdue Australian Vote on UN Palestinian Sovereignty Resolution.” Australia Palestine Advocacy Network. 2024.

Australia Palestine Advocacy Network. 2024. “APAN Welcomes Reinstated UNRWA Funds, Demands Ceasefire, an End to Genocide to Ensure Aid Gets to Gaza.” Australia Palestine Advocacy Network. 2024.

Australia Palestine Advocacy Network. 2024. “A Practical Guide for Demanding an End to Israel’s Genocide in Gaza.” Australia Palestine Advocacy Network. MP Engagement Toolkit. 2024.

Australia Palestine Advocacy Network. 2024. "Government Envoys Fail All Communities in Fight against Racism: APAN." Australia Palestine Advocacy Network. 2024. Accessed on 10 September 2024 from [https://apan.org.au/media\\_release/government-envoys-fail-all-communities-in-fight-against-racism-apan/](https://apan.org.au/media_release/government-envoys-fail-all-communities-in-fight-against-racism-apan/).

Australia Palestine Advocacy Network. 2024. "One Year Too Many: APAN Calls out Australia's Complicity in Israel's Ongoing Gaza Genocide." Australia Palestine Advocacy Network. 2024. Accessed on 30 September 2024 from [https://apan.org.au/media\\_release/one-year-too-many/](https://apan.org.au/media_release/one-year-too-many/).

Australia Palestine Advocacy Network. 2024. "Poll Shows Community Expects Government Action, Not Just Words, on Gaza Genocide: APAN."

Australia Palestine Advocacy Network. n.d. n.d. "A Practical Guide for Demanding an End to Israel's Genocide In Gaza." *MP ENGAGEMENT TOOLKIT*.

Biswas, Avijit. 2020. "Pressure Group: Meaning, Definitions, Features, & 4 Types." *SCHOOL OF POLITICAL SCIENCE*. Accessed on 17 October 2024 from <https://schoolofpoliticalscience.com/definitions-types-of-pressure-groups/>.

Bowen, Jeremy. 2021. "Israel-Palestinians: Old Grievances Fuel New Fighting," May.

Canales, Sarah B. 2024. "Australia Backs UN Resolution Recognising 'permanent Sovereignty' of Palestinians in Major Departure." *The Guardian*. Accessed on 14 July 2024 from <https://www.theguardian.com/australia-news/2024/nov/14/australia-backs-un-resolution-recognising-permanent-sovereignty-of-palestinians-in-major-departure>.

- Clarence, Jessica. 2018. "Who Funds Federal Parliamentarians' Overseas Travel?" *Australian Strategic Policy Institute*.
- CNN. 2024. "Beda Dengan AS, Australia Dukung Palestina Jadi Anggota PBB." *CNN Indonesia*, 2024. Accessed on 14 July 2024 from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240511120651-113-1096304/beda-dengan-as-australia-dukung-palestina-jadi-anggota-pbb>.
- Dillon, Mary E. 1942. *The American Political Science Review*. Pressure Groups 36.
- Greene, Richard. 2022. "Australia Reverses Trump-Era Recognition of West Jerusalem as Capital of Israel." CNN. October 18, 2022. Accessed on 15 October 2024 from <https://edition.cnn.com/2022/10/18/australia/australia-israel-capital-reversal-intl-hnk/index.html>.
- Halpin, Darren. 2012. "Pressure Groups and Lobbying. In Contemporary Politics in Australia: Theories, Practices and Issues." *N.p.: Cambridge University*, 177–87.
- Ḥanafī, Sārī, and Lindā Ṭabar. 2005. "The Emergence of a Palestinian Globalized Elite : Donors, International Organizations, and Local NGOs." In *N.p.: Institute of Jerusalem Studies*.
- Han, Eulalia. 2010. "Australian Political Science Association Conference (APSA)." *Australia Policy on The Israel-Palestine Peace Process: Influence and Implication*, 2010.
- Jaber, Samer. 2024. "The West Bank: Israel's Other Genocidal War in Palestine." *Al Jazeera*. Accessed on 20 October 2024 from <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/8/29/the-west-bank-israels-other-genocidal-war-in-palestine>.

- Jazeera, Al. 2024. "Australia Imposes Sanctions on Israeli Settlers," May.
- Kedutaan Besar Australia Indonesia. n.d. n.d. "Sistem Pemerintahan Australia."  
*Kedutaan Besar Australia.* Accessed December 14, 2024.  
[https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem\\_pemerintahan.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html).
- Koster, Alexandra. 2024. "UN Resolution on Palestinian Sovereignty: Australia's Vote and What It Means." *SBS*, 2024. Accessed on 3 November 2024 from  
<https://www.sbs.com.au/news/article/australia-votes-to-recognise-permanent-sovereignty-of-palestinians/yle0y3hut>.
- Lim, Andrew. 2021. "The Transnational Networking, Public Diplomacy and Nation Branding of pro-Palestine and pro-Israel Advocacy Groups in New Zealand and Australia." *Canadian Political Science Association (CPSA)*, 2021.
- Lim, Andrew. n.d. n.d. "The Transnational Networking, Public Diplomacy and Nation Branding of pro-Palestine and pro-Israel Advocacy Groups in New Zealand and Australia."
- McCabe, Rosie. 2022. "What Does Anthony Albanese's Victory Mean for Future Australia-Palestine Relations?" Australia Palestine Advocacy Network. May 2022.
- McKinnon, Alex. 2023. "Muslim Voters Are Disappointed with Labor's Weakness on Israel's Bombardment." Australia Palestine Advocacy Network. 2023.
- Minister for Foreign Affairs. 2023. "National Statement to the United Nations General Assembly." *Minister for Foreign Affairs*, 2023. Accessed on 1 December 2024 from <https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/speech/national-statement-united-nations-general-assembly>.

Ministry of Foreign Affairs. 2024. "Bilateral Relations." *Ministry of Foreign Affairs*.

Accessed on 12 November 2024 from  
<https://new.embassies.gov.il/australia/en/the-embassy/bilateral-relations>.

Moon, Jeremy, and eds Campbell Sharman. 2003. *Australian Politics and Government: The Commonwealth, the States and the Territories*. N.p.: Cambridge University Press.

Napach, Lily. 2023. "Australia's Evolving Debate on Israel and Palestine." *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, August 2023.

Newsdesk, J-Wire. 2021. "QLD Labor Accuses Israel of Ethnic Cleansing."

Next Ias. 2024. "Pressure Groups: Definition, Techniques, Role, Characteristics & Types."

Next ias. 2024. "Pressure Groups: Definition, Types, Characteristics & More." *Next Was*, 2024. Accessed on 12 October 2024 from  
<https://www.nextias.com/blog/pressure-groups/>.

Osman, Nadda. 2021. "Sheikh Jarrah: Activists Raise Concerns over Deleted Social Media Content." *Middle East Eye*, 2021. Accessed on 22 November 2024 from  
<https://www.middleeasteye.net/news/sheikh-jarrah-israel-palestine-activists-social-media-deleted-content-concerns>.

Sadler, Miriam. 2018. "The ALP and Palestine: An Assessment of Differing Australian Labor Party Views on the Issue of Recognition of the State of Palestine and the Likelihood of a Resolution Calling for Immediate Recognition Passing at the National Conference in July 2018," May.

Smith, Paul H. 2022. "Major Parties Scorecard on Palestine." Australia Palestine Advocacy Network. 2022.

UN Digital Library. n.d. n.d. "Peaceful Settlement of the Question of Palestine : Resolution / Adopted by the General Assembly." Accessed October 12, 2024. <https://digitallibrary.un.org/record/428573?ln=en>.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2024. "Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #102."